

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT JAMKRIDA JABAR
(PERSERODA)

2024

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

i	DAFTAR ISI <i>TABLE OF CONTENT</i>	11	Komposisi Direksi <i>Composition of the Board of Directors</i>
1	PENDAHULUAN <i>INTRODUCTION</i>	13	Profil Direksi <i>Board of Director Profile</i>
1	Komitmen Penerapan GCG <i>GCG Implementation Commitment</i>	17	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi <i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors</i>
1	Tujuan Penerapan GCG <i>Purpose of GCG Implementation</i>	21	Komposisi Dewan Komisaris <i>Composition of the Board of Commissioners</i>
2	Dasar Penerapan GCG <i>Base of GCG Implementation</i>	24	Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner Profile</i>
2	Struktur dan Mekanisme GCG <i>GCG Structure and Mechanism</i>	30	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>
4	Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>	33	Komposisi Dewan Pengawas Syariah <i>Composition of the Board of Sharia Supervisory</i>
5	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan <i>Annual General Meeting of Shareholders</i>	34	Profil Dewan Pengawas Syariah <i>Board of Sharia Supervisory Profile</i>
6	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	38	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah <i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Sharia Supervisory</i>
11	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK <i>TRANSPARENCY IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	40	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris <i>Completeness and Implementation of Duties of Company Committees Under the Board of Commissioners</i>
11	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah <i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory</i>		

<p>44 Komite Audit <i>Audit Committee</i></p> <p>48 Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i></p> <p>54 Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i></p> <p>57 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Direksi <i>Completeness and Implementation of Duties of Company Committees Under the Directors</i></p> <p>62 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal <i>Implementation of Compliance, Internal Auditor, and External Auditor Functions</i></p> <p>74 Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi <i>Implementation of Risk Management, Internal Control System, and Information Technology Governance</i></p> <p>76 Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan <i>Implementation of Remuneration Policy and Other Facilities for Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, and Employees</i></p> <p>80 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan <i>Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions</i></p> <p>80 Rencana Strategis Perusahaan <i>Corporate Strategic Plan</i></p>	<p>85 Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (Lima per Seratus) atau Lebih, yang meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham <i>Disclosure of Share Ownership of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners which Achieve 5% (Five Per Hundred) or More, which Covers Type and Number of Share</i></p> <p>86 Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisiaris Lain, Anggota Dewan Pengawas Syariah Lain, dan/atau Pemegang Saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda) <i>Disclosure of Financial Relationships and Family Relationships of Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of The BSS with Other Members of the Board of Directors, Other Members of the Board of Commissioners, Other BSS Members, and/or Shareholders of PT Jamkrida Jabar (Perseroda)</i></p> <p>89 Pengungkapan Hal Penting Lainnya <i>Other Important Disclosures</i></p> <p>93 PENILAIAN SECARA MANDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK <i>SELF ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i></p> <p>94 RENCANA TINDAK <i>ACTION PLAN</i></p>
--	--

PENDAHULUAN

INTRODUCTION

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (“Perusahaan”) memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten dan berkelanjutan di dalam Perusahaan. Implementasi GCG merupakan pondasi penting untuk menggapai visi Perusahaan yaitu “*Menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah*”.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mengimplementasikan GCG adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GCG

Good Corporate Governance (GCG) is a system designed to direct the professional management of a company based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality.

PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (“the Company”) has a strong commitment to implement GCG consistently and sustainably within the Company. GCG implementation is an important foundation to achieve the Company's vision of “becoming a Trusted Credit Guarantee Company that Contributes to Regional Economic Growth”.

PURPOSE OF IMPLEMENTING GCG

The objectives of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) in implementing GCG are:

1. *As a guideline for the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board in carrying out supervision and providing advice to the Board of Directors in the management of the Company.*
2. *As a guideline for the Board of Directors so that in carrying out the daily activities of the Company it is based on high moral values with due regard to the articles of association, business ethics, and applicable laws and regulations.*
3. *As a guideline for the management and employees of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) in carrying out their daily activities and duties in accordance with GCG principles.*

DASAR PENERAPAN GCG

Implementasi GCG di PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Yang Baik Provinsi Jawa Barat.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Jamkrida Jabar (Perseroda) bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien, serta menumbuhkan nilai bagi pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perseroan telah menanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis Perseroan, hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan, dan perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis penjaminan.

Perseroan telah membangun landasan maupun kerangka acuan untuk menunjang GCG. Hal ini tertuang dalam:

1. Visi dan Misi Perseroan yang memberikan arah dan strategi pengembangan usaha secara jelas.
2. Struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggungjawaban secara jelas menyangkut unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Satuan

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

GCG implementation in PT Jamkrida Jabar (Perseroda) refers to the prevailing laws and regulations such as:

- 1. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
- 2. Financial Services Authority Regulation Number: 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantor Institutions.*
- 3. Circular Letter of the Financial Services Authority Number: 54/SEOJK.05/2017 concerning Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantor Institutions.*
- 4. West Java Governor Regulation Number: 105 of 2020 concerning Regulations on the Implementation of Good Corporate Governance of Regional-Owned Enterprises of West Java Province.*

GCG STRUCTURE AND MECHANISM

The implementation of GCG principles in PT Jamkrida Jabar (Perseroda) aims to obtain good, effective, and efficient results, and foster value for shareholders and stakeholders.

The Company has embedded in the culture and business behavior of the Company, this is reflected in the fairness in business transactions, transparency, and management behavior in running the guarantee business.

The Company has built a foundation and terms of reference to support GCG. This is contained in:

- 1. The Company's Vision and Mission which provides a clear direction and strategy for business development.*
- 2. An organizational structure that clearly illustrates the lines of responsibility regarding the main elements of the implementation of corporate governance, which includes the Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors,*

Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko dan Klaim, serta Sekretaris Perusahaan.

3. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Penerapan GCG bagi Perseroan tidak hanya keharusan dalam rangka memenuhi regulasi tetapi merupakan elemen fundamental yang mengacu pada *international best practices* untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan GCG yang komprehensif di beberapa industri dan perusahaan terbukti telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai perusahaan (*value creation*) dan telah memberikan manfaat nyata bagi masing-masing industri dan Perseroan, antara lain meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik investor lokal maupun luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai PT Jamkrida Jabar (Perseroda) untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris,

Corporate Governance Unit, and the Board of Directors.

3. *Supervisory function of the Board of Commissioners.*

The implementation of GCG for the Company is not only a necessity in order to fulfill regulations but is a fundamental element that refers to international best practices for healthy and sustainable business continuity in the long term. The comprehensive implementation of GCG in several industries and companies has proven to have made a positive contribution in increasing company value (value creation) and has provided tangible benefits for each industry and the Company, including increased competitiveness and company performance as well as the trust of stakeholders, both local and foreign investors.

To achieve this, of course, it requires a joint commitment of all levels of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and PT Jamkrida Jabar (Perseroda) employees to implement GCG principles as a foundation in carrying out guarantee business activities, which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality.

The Company believes that consistent implementation of GCG principles and practices will provide benefits, both for the Company and its Stakeholders, by:

1. *Increasing management's seriousness in applying the principles of openness, accountability, responsibility, independence, fairness and prudence in the management of the Company.*
2. *Improving the Company's performance, efficiency, management and services to Stakeholders.*
3. *Protect the Company from external intervention and lawsuits*
4. *Avoiding conflict of interest between the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and Shareholders with the Company.*

Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

PT Jamkrida Jabar (Perseroda) menyadari pentingnya GCG dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi para Pemangku Kepentingan. Dalam mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan, perusahaan berusaha menjalankan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait kelangsungan bisnis dan operasional Perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan perusahaan. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

PT Jamkrida Jabar (Perseroda) realizes the importance of GCG in supporting business growth and providing added value to Stakeholders. In implementing GCG in a comprehensive and sustainable manner, the company strives to implement GCG principles and practices based on the prevailing laws and regulations.

According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("PT Law"), Limited Liability Companies have 3 (three) important organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the Company and holds all authority that is not delegated to the Board of Commissioners and Board of Directors. The GMS is also a forum for shareholders to make important decisions related to the continuity of the Company's business and operations.

Decisions made at the GMS are based on the interests of the Company. Shareholders do not intervene in the duties, functions and authority of the Board of Commissioners and Board of Directors to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations. GMS decision making is conducted in a fair and transparent manner.

Throughout 2024, the Company has held 1 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and 2 Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 diselenggarakan pada tanggal 03 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan setda Provinsi Jawa Barat yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

The Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 was held on May 03, 2024 at the 4th Floor Meeting Room of the Bureau of BUMD, Investment, and Development Administration of the West Java Provincial Secretariat which decided the following matters:

1. Keputusan Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Keputusan Agenda Kedua
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk beban bonus dan tantiem di dalamnya yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sebagaimana dimuat dalam laporan Auditor Independen nomor 00146/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 tanggal 29 April 2024 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian/Wajar Tanpa Modifikasian, dengan adanya pengesahan tersebut maka Para Pemegang Saham memberikan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris terkait atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah disampaikan.
3. Keputusan Agenda Ketiga
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

1. *First Agenda Resolution*
Shareholders approved and ratified the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023.
2. *Second Agenda Resolution*
The Shareholders approved and ratified the Annual Report and Financial Statements of the Company for the Financial Year 2023, including bonus and tantiem expenses therein, which have been audited by KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) as contained in the Independent Auditor's report number 00146/2.1000/AU.1/08/1290-4/1/IV/2024 dated April 29, 2024 with an Unqualified Opinion / Fair Without Modification, with this ratification, the Shareholders grant full release (Acquit et decharge) to all relevant Directors and Board of Commissioners for all management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2023 (two thousand twenty-three), as long as these actions are in accordance with applicable laws and regulations and are reflected in the annual report and financial statements that have been submitted.
3. *Third Agenda Resolution*
The Shareholders approved and ratified the proposed Use of the Company's Net Income for the Financial Year 2023.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 tersebut dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal

The decisions of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2023 are set

03 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Dindin Saepudin, S.H.

forth in Deed No. 03 dated May 03, 2024 made before Notary Dindin Saepudin, S.H.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on October 28, 2024 at the 4th Floor Meeting Room of the Bureau of BUMD, Investment, and Development Administration of the Regional Secretariat of West Java Province which decided the following matters:

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan yang tercantum dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda).
2. Menyetujui Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar yang semula sebesar 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham atau senilai Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) menjadi sebesar 104.112 (seratus empat ribu seratus dua belas) lembar saham atau senilai Rp 1.041.120.000.000,- (satu triliun empat puluh satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).
3. Menyetujui pengunduran diri Mohammad Taufiq Budi Santoso dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan.
4. Menyetujui Penegasan kembali Muhammad Iskandar sebagai Komisaris Independen Perseroan.

1. *Approved the adjustment of the Company's Articles of Association regarding the Name and Place of Residence listed in Article 1 of the Company's Articles of Association in accordance with Government Regulation Number 54 of 2017 (two thousand seventeen) concerning West Java Regional Owned Enterprises in accordance with West Java Provincial Regulation Number 2 of 2024 concerning Changes in the Legal Form of the Guarantee Company Changes in the Legal Entity Form of the West Java Regional Credit Guarantee Company into a Limited Liability Company of West Java Regional Credit Guarantee (Perseroda).*
2. *Approve the Company to increase its authorized capital from 30,000 (thirty thousand) shares or IDR300,000,000,000,- (three hundred billion rupiah) to 104,112 (one hundred four thousand one hundred twelve) shares or IDR1,041,120,000,000,- (one trillion forty one billion one hundred twenty million rupiah).*
3. *Approved the resignation of Mohammad Taufiq Budi Santoso from his position as President Commissioner of the Company.*
4. *Approved the reaffirmation of Muhammad Iskandar as Independent Commissioner of the Company.*

5. Menyetujui untuk mengangkat Muhammad Iskandar sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan, dan yang bersangkutan untuk diajukan mengikuti Fit and proper Test/Uji Kemampuan dan Kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta yang bersangkutan efektif menjabat sebagai Komisaris Utama Independen secara Definitif terhitung dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diberhentikan sewaktu – waktu oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. selanjutnya selama yang bersangkutan belum lulus Fit and Proper Test/Uji Kemampuan dan Kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka yang bersangkutan tetap menjalankan jabatan sebagai Komisaris Independen.

5. Approved to appoint Muhammad Iskandar as Independent President Commissioner of the Company, and the person concerned to be submitted to the Fit and Proper Test / Fit and Proper Test at the Financial Services Authority (OJK), and the person concerned will effectively serve as Independent President Commissioner Definitively as of passing the Fit and Proper Test by the OJK with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association and can be dismissed at any time by the shareholders at the General Meeting of Shareholders. Furthermore, as long as the person concerned has not passed the Fit and Proper Test / Fit and Proper Test at the Financial Services Authority (OJK), the person concerned will continue to serve as Independent Commissioner.
6. Menyetujui untuk mengangkat H. Yogi Gautama J, SH., MT, sebagai Komisaris Perseroan dan yang bersangkutan untuk diajukan mengikuti Fit and proper Test/Uji Kemampuan dan Kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta yang bersangkutan efektif sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 28 Oktober 2028 dan berlaku efektif menjadi komisaris Definitif setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diberhentikan sewaktu – waktu oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Approved to appoint H Yogi Gautama J, SH, MT as Commissioner of the Company and the person concerned to be submitted to the Fit and Proper Test / Fit and Proper Test at the Financial Services Authority (OJK), and the person concerned is effective from October 28, 2024 to October 28, 2028 and is effective as a Definitive Commissioner after passing the Fit and Proper Test by the OJK with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association and can be dismissed at any time by the shareholders at the General Meeting of Shareholders.
7. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat, Agus Subrata sebagai Plt Direktur Utama Perseroan, sehingga hanya menjabat sebagai Direktur Keuangan, selanjutnya mengenai pelepasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit de charge*) akan diberikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan berdasarkan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik.

7. Approved to respectfully dismiss, Agus Subrata as Acting President Director of the company, so that he only serves as Finance Director, then regarding the release and discharge of responsibility (acquit de charge) will be given at the time of the annual General Meeting of Shareholders held based on the Audit Results of the Public Accounting Firm.

8. Menyetujui untuk mengangkat Taufiek Dharviandi sebagai Direktur Utama Perseroan dan yang bersangkutan untuk diajukan mengikuti Fit and proper Test/Uji Kemampuan dan Kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta yang bersangkutan efektif menjabat sebagai Direktur Utama secara Definitif terhitung dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diberhentikan sewaktu – waktu oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. selanjutnya selama yang bersangkutan belum lulus Fit and Proper Test/Uji Kemampuan dan Kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka yang bersangkutan tetap menjalankan jabatan sebagai Direktur Operasional.

8. *Approved to appoint Taufiek Dharviandi as President Director of the Company and the person concerned to be submitted to the Fit and Proper Test / Fit and Proper Test at the Financial Services Authority (OJK), and the person concerned is effective as President Director Definitively as of passing the Fit and Proper Test by the OJK with a term of office in accordance with the Company's Articles of Association and can be dismissed at any time by the shareholders at the General Meeting of Shareholders. Furthermore, as long as the person concerned has not passed the Fit and Proper Test / Fit and Proper Test at the Financial Services Authority (OJK), the person concerned continues to carry out his position as Operations Director.*

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Dindin Saepudin, S.H.

The resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are set forth in Deed No. 03 dated October 28, 2024 made before Notary Dindin Saepudin, S.H.

JABATAN POSITION	NAMA NAME	DASAR PENGANGKATAN APPOINTMENT BASIS	DASAR PEMBERHENTIAN DISMISSAL BASIS	KETERANGAN INFORMATION
Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Akta RUPS Sirkuler No. 07 Tanggal 21-12-2021 <i>Deed of Circular GMS No. 07 Dated 21-12-2021</i>	Akta RUPS LB No. 03 Tanggal 28-10-2024 <i>Deed of EGMS No. 03 Dated 28-10-2024</i>	Mengundurkan Diri <i>Resign</i>
Komisaris Utama Independen <i>Independent President Commissioner</i>	Muhammad Iskandar	Akta RUPS LB No. 03 Tanggal 28-10-2024 <i>Deed of EGMS No. 03 Dated 28-10-2024</i>	-	Sejak dinyatakan lulus fnp OJK <i>Since Passed the FSA's fnp</i>
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Muhammad Iskandar	Akta RUPS LB No. 04 Tanggal 28-11-2023 <i>Deed of EGMS No. 04 Dated 28-11-2023</i>	Akta RUPS LB No. 03 Tanggal 28-10-2024 <i>Deed of EGMS No. 03 Dated 28-10-2024</i>	Periode Pertama <i>First Period</i>
Komisaris <i>Commissioner</i>	Yogi Gautama Jaelani	Akta RUPS LB No. 03 Tanggal 28-10-2024 <i>Deed of Extraordinary GMS No. 03 Dated 28-10-2024</i>	-	Sejak dinyatakan lulus fnp OJK <i>Since Passed the FSA's fnp</i>

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 2024

JABATAN POSITION	NAMA NAME	DASAR PENGANGKATAN APPOINTMENT BASIS	TERHITUNG MULAI STARTING FROM	KETERANGAN INFORMATION
Direktur Utama <i>President Director</i>	Taufiek Dharviandi	Akta RUPS LB No. 03** Tanggal 28-10-2024 <i>Deed of Extraordinary GMS No. 03 Dated 28-10-2024</i>	-	Sejak dinyatakan lulus fnp OJK <i>Since Passed the FSA's fnp</i>
Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Agus Subrata	Akta RUPS LB No. 02* Tanggal 10-10-2023 <i>Deed of EGMS No. 02 Dated 10-10-2023</i>	-	Perpindahan dari Direktur Operasional menjadi Direktur Keuangan <i>Transfer from Operations Director to Finance Director</i>
Direktur Operasional <i>Operations Director</i>	Taufiek Dharviandi	Akta RUPS LB No. 02 Tanggal 10-10-2023 <i>Deed of EGMS No. 02 Dated 10-10-2023</i>	Akta RUPS LB No. 03 Tanggal 28-10-2024 <i>Deed of Extraordinary GMS No. 03 Dated 28-10-2024</i>	Perpindahan dari Direktur Operasional menjadi Direktur Utama <i>Transfer from Operations Director to President Director</i>

* Untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Utama Perseroan, Pemegang Saham sepakat agar tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktur Utama dirangkap oleh Direktur Keuangan dan berakhir pada 28 Oktober 2024 setelah posisi Direktur Utama terisi.

* *To fill the vacant position of President Director of the Company, the Shareholders agreed that the duties, powers and responsibilities of the President Director shall be concurrently assumed by the Finance Director and end on October 28, 2024 after the position of President Director is filled.*

** Untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Operasional Perseroan, Pemegang Saham sepakat agar tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktur Operasional dirangkap oleh Direktur Utama dan berakhir setelah posisi Direktur Operasional terisi.

** *To fill the vacant position of the Company's Director of Operations, the Shareholders agree that the duties, powers and responsibilities of the Director of Operations shall be concurrently assumed by the President Director and end after the position of the Director of Operations is filled.*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 29 November 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Biro

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on November 29, 2024 at the 4th Floor Meeting Room of the Bureau of

BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2025.
2. Keputusan Agenda Kedua
Pemegang Saham menyetujui untuk melakukan pelepasan aset Perseroan tahun 2024 yang dalam melakukan penjualan kendaraan operasional agar dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kelola yang baik serta dengan harga yang tidak boleh dibawah harga pasar.
3. Keputusan Agenda Ketiga
Pemegang Saham menyetujui usulan Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Garce, Karunawan untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dituangkan dalam Akta No. 95 tanggal 29 November 2024 yang dibuat di hadapan Notaris R Tedy Suwarman, SH.

BUMD, Investment, and Development Administration of the Regional Secretariat of West Java Province which decided the following matters:

1. *First Agenda Resolution*
Shareholders approved the Company's Work Plan and Budget for Financial Year 2025.
2. *Second Agenda Resolution*
Shareholders approved the disposal of the Company's assets in 2024, in which the sale of operational vehicles should be carried out in accordance with standard operating procedures (SOP) and good governance and at a price that should not be below market price.
3. *Third Agenda Resolution*
The Shareholders approved the proposal of the Board of Commissioners based on the proposal of the Audit Committee for the appointment of Public Accountant Firm Hertanto, Garce, Karunawan for the Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.

The decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are set forth in Deed No. 95 dated November 29, 2024 made before Notary R Tedy Suwarman, SH.

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TRANSPARENCY IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

KOMPOSISI DIREKSI

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Keputusan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile
1	Taufiek Dharviandi	Direktur Utama; (Plt. Direktur Operasional) <i>President Director; (Acting Director of Operations)</i>	Dalam Proses Uji Kemampuan dan keputusan oleh Otoritas Jasa Keuangan <i>In the Fit and Proper Test Process by the Financial Services Authority</i>	Akta RUPS LB No.03 Tanggal 28-10-2024 <i>Deed of EGMS No. 03 dated 28-10-2024</i> (Sejak dinyatakan lulus fnp OJK) <i>(Since Passed the FSA fnp)</i>	Indonesia	Indonesia
2	Agus Subrata	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.: KEP-432/NB.11/2021 <i>Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-432/NB.11/2021</i>	Akta No. 74 tanggal 13-09-2021 <i>Deed No. 74 dated 13-09-2021</i>	Indonesia	Indonesia

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 2024

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Keputusan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile
3	Taufiek Dharviandi	Direktur Operasional Operations Director	20-11-2023 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.: KEP-198/PD.02/2023 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-198/PD.02/2023	Akta RUPS LB No. 02 Tanggal 10-10-2023 Deed ogf EGMS No. 02 dated 10-10-2023	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2024 terdapat perubahan susunan Direksi seperti tersebut di atas.

During 2024 there will be changes to the composition of the Board of Directors as mentioned above.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTOR PROFILE



AGUS SUBRATA

Direktur Keuangan
Finance Director

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 01 Juni 1968.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on June 1, 1968.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul tahun 2014.
- S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 1993.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- *Master of Management at Esa Unggul University in 2014.*
- *Bachelor of Government Science from Padjadjaran University in 1993.*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Keuangan (Plt. Direktur Utama) PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 10 Oktober 2023 sesuai Akta Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2023. Dalam Keputusan RUPSLB tanggal 28 Oktober 2024 sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (Perseroda) Nomor 03 tanggal 28 Oktober 2024 menjabat sebagai Direktur Keuangan.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and appointed as Finance Director (Acting President Director) of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) based on the EGMS Resolution dated October 10, 2023 in accordance with Deed Number: 02 dated October 10, 2023. In the EGMS Resolution dated October 28, 2024 in accordance with the Deed of Minutes of the EGMS of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (Perseroda) Number 03 dated October 28, 2024 served as Finance Director.

PERIODE MENJABAT

- Direktur Keuangan
Melanjutkan Masa Jabatan, 10 Oktober 2023 s.d. 31 Agustus 2026
- Direktur Operasional
13 September 2021 – 10 Oktober 2023.

PERIOD OF SERVICE

- *Finance Director*
Continuing the term of office, October 10, 2023 until August 31, 2026.
- *Operations Director*
September 13, 2021 – October 10, 2023.

HUBUNGAN AFILIASI

Agus Subrata tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

AFFILIATION RELATIONSHIP

Agus Subrata has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Agus Subrata tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Agus Subrata does not own the Company's shares.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (Perseroda) (Oktober 2024 – Sekarang)
- Plt Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan (Oktober 2023 – Oktober 2024)
- Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (September 2021- Oktober 2023).
- Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (2020 – sekarang).
- Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (2020 – 2021).
- Komisaris Independen PT Sahabat Insurance d/h PT Bess Central Insurance (2018 – 2021).
- Direktur Utama PT Berdikari Logistik Indonesia (2016 – 2017).
- Asisten Direktur Teknik dan R&D PT Berdikari Logistik Indonesia (2013 – 2015).
- Direktur PT Tala Re International Reinsurance Broker Direktur (2010 – 2013).

WORK HISTORY

- *Finance Director of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (Perseroda) (October 2024 - Present)*
- *President Director concurrently Finance Director (October 2023 - October 2024)*
- *Director of Operations of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (September 2021- October 2023).*
- *Lecturer at Trisakti College of Insurance Management (2020 - present).*
- *Vice Chairman II of Trisakti Insurance Management College (2020 - 2021).*
- *Independent Commissioner of PT Sahabat Insurance formerly PT Bess Central Insurance (2018 - 2021).*
- *President Director of PT Berdikari Logistik Indonesia (2016 - 2017).*
- *Assistant Director of Engineering and R&D*
- *PT Berdikari Logistik Indonesia (2013 - 2015).*
- *Director of PT Tala Re International Reinsurance Broker Director (2010 - 2013).*



TAUFIEK DHARVIANDI

Direktur Operasional
Operations Director

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 26 Maret 1971

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on March 26, 1971

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul tahun 2015.
- S1 fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik di Universitas Pasundan tahun 1994

EDUCATION HISTORY

- *Master of Management at Esa Unggul University in 2015.*
- *Bachelor of Faculty of Social and Political Sciences at Pasundan University in 1994.*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar (Perseroda) untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 13 September 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: 74 tanggal 13 September 2021. Diangkat menjadi Direktur Keuangan merangkap Plt. Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 10 Oktober 2023 sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: 02 tanggal 10 Oktober 2023. Dalam Keputusan RUPSLB tanggal 28 Oktober 2024 sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor 03 tanggal 28 Oktober 2024 menjabat sebagai Direktur Utama (Efektif sejak dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari OJK) dan PLT Direktur Operasional.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and appointed as Director of Operations of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) for the first time based on the EGMS Resolution dated September 13, 2021 in accordance with the Deed of Shareholders' Resolution (Circular) of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number: 74 dated September 13, 2021. Appointed as Finance Director concurrently Acting. President Director based on the EGMS Resolution dated October 10, 2023 in accordance with the Deed of Minutes of EGMS of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number: 02 dated October 10, 2023. In the EGMS Resolution dated October 28, 2024 in accordance with the Deed of Minutes of the EGMS of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number 03 dated October 28, 2024 served as President Director (Effective since passed the Fit and Proper Test from OJK) and PLT Operations Director.

PERIODE MENJABAT

Februari 2024 – 10 Oktober 2028.

PERIOD OF SERVICE

October 10, 2023 - October 10, 2028.

HUBUNGAN AFILIASI

Taufiek Dharviandi tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Taufiek Dharviandi has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Taufiek Dharviandi tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Taufiek Dharviandi does not own the Company's shares.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (Februari 2024 – sekarang)
- Pimpinan Unit Syariah PT. Reasuransi Nusantara Makmur (2020 - Jan 2024)
- Associate Director of Financial Insurance
- PT. Reasuransi Nusantara Makmur (2018 – Jan 2024)
- Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT. Asuransi ASEI Indonesia (2015-2016)
- Kepala Divisi Underwriting Penjaminan
- PT. Asuransi Ekspor Indonesia (2014-2015)
- Kepala Divisi SBU Asuransi Ekspor PT. Asuransi Ekspor Indonesia (2013-2014)

WORK HISTORY

- Director of Operations of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (February 2024 - present)
- Head of Sharia Unit of PT Reasuransi Nusantara Makmur (2020 - Jan 2024)
- Associate Director of Financial Insurance
- Reinsurance Nusantara Makmur (2018 - Jan 2024)
- Head of Risk Management and Compliance Division of PT Asuransi ASEI Indonesia (2015-2016)
- Head of Underwriting Division
- PT Asuransi Ekspor Indonesia (2014-2015)
- Head of SBU Export Insurance Division of PT Asuransi Ekspor Indonesia (2013-2014)

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.
- c. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- g. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional lembaga keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is an organ of the company that is fully responsible for the management of the company for the interests and objectives of the company in accordance with the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors is collectively responsible for managing the company.

All members of the Company's Board of Directors have met the following criteria:

- a. *The appointment of members of the Board of Directors is made by the GMS.*
- b. *Have met the fit and proper test provisions of the Financial Services Authority, the Limited Liability Company Law and related GCG provisions and have obtained approval from the Financial Services Authority and Shareholders.*
- c. *All members of the Board of Directors have adequate integrity, competence and financial reputation.*
- d. *Members of the Board of Directors do not take and/or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS.*
- e. *All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia.*
- f. *All members of the Board of Directors are Indonesian citizens.*
- g. *All members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in the field of financial institution operations.*

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors is the Company's organ responsible for the management of the Company. The Board of Directors shall, in good faith and with full responsibility for the interests of the Company, manage the business and affairs of the Company with due regard to balancing the interests of all parties with an interest in the Company's activities. The Board

Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau

of Directors acts carefully, cautiously and by considering various important relevant aspects in the implementation of its duties. The Board of Directors uses its authority for the sole benefit of the Company.

The Board of Directors has the following duties and authorities:

1. *The main duties of the Board of Directors are:*
 - a) *To lead and manage the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and always try to improve the efficiency and effectiveness of the Company;*
 - b) *To control, maintain and manage the Company's assets.*
2. *The Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties for the benefit of the Company in achieving its aims and objectives.*
3. *Each member of the Board of Directors shall in good faith and with full responsibility perform his/her duties for the interests and business of the Company with due observance of the prevailing laws and regulations.*
4. *In carrying out their duties, the following acts of the Board of Directors must inform or obtain written approval from the Board of Commissioners, namely:*
 - a. *Any change in the Company's investment in other companies, whether in the form of transfer of shares, reduction of shares, or increase of shares. The Board of Directors must obtain approval from the President Commissioner and one member of the Board of Commissioners. Or if the President Commissioner is absent, then for such action the Board of Directors must obtain approval from 2 (two) members of the Company's Commissioners.*
 - b. *Legal actions to transfer, release rights or make debt collateral for all or part of the Company's assets within 1 (one) fiscal year, either in one transaction or several transactions that stand alone or are related or the same must obtain the approval of the GMS which is attended or represented by*

- beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Shareholders who own at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total number of shares that have valid voting rights and the decision is approved by at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total number of votes legally issued in the Meeting.*
- c. *The legal actions to transfer or pledge debts or release rights over the Company's assets above, shall also be announced in 2 (two) daily newspapers in Indonesian language circulating in the domicile of the Company at the latest 30 (thirty) days as from the legal actions.*
5. *The President Director shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company provided that all such actions of the President Director have been approved in the Board of Directors Meeting. If the President Director is absent or unable to act for any reason, which need not be proven to a third party, then any other member of the Board of Directors shall be entitled and authorized to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company.*
 6. *The Board of Directors, for certain acts on its own responsibility, is also entitled to appoint one or more representatives or proxies, by granting to him or them the power for such certain acts as stipulated in the Power of Attorney. The division of duties and authority of each member of the BOD shall be determined by the GMS and such authority may be delegated to the BOC by the GMS.*

Frekuensi Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Frequency of Board of Directors Meetings held in 1 (one) year

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa “Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan”.

In accordance with POJK No.3/POJK.05/2017, regarding Good Corporate Governance for Guarantor Institutions, article 17 that “The Board of Directors of a Guarantor Institution must hold regular Board of Directors meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month”.

Selama tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (*dua puluh*) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

During 2024, the Board of Directors held 20 (twenty) meetings with the following attendance:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
1	Agus Subrata	13
2	Taufiek Dharviandi	19

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Keputusan <i>Pass Date and Fit & Proper Test Results</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) <i>Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)</i>	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile
1	Mohammad Taufiq Budi Santoso	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	03-12-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.: KEP-801/NB.11/2021 <i>Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-801/NB.11/2021</i>	Akta No. 07 tanggal 21-12-2021 Masa Jabatan 2 tahun 11 bulan Berakhir tanggal 28-10-2024 Dipertegas dengan Akta No. 04 tanggal 28-10-2024 <i>Deed No. 07 dated 21-12-2021 Term of Office 2 years 11 months Ends 28-10-2024 Confirmed by Deed No. 04 dated 28-10-2024</i>	Indonesia	Indonesia
2	Muhammad Iskandar	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	03-05-2024 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No: KEP-195/PD.02/2024 <i>Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-195/PD.02/2024</i>	Akta RUPS No. 03 Tanggal 28-11-2023 <i>Deed on November 26, 2023 Confirmed by Deed No. 03 dated 27-11-2023</i>	Indonesia	Indonesia

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 2024

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Keputusan <i>Pass Date and Fit & Proper Test Results</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) <i>Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)</i>	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Domisili <i>Domicile</i>
3	Muhammad Iskandar	Komisaris Utama Independen <i>Independent President Commissioner</i>	<p>Dalam Proses Uji Kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan <i>In the Process of Fit and Proper Test by the Financial Services Authority</i></p> <p>27-03-2025 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No: KEP-57/KO.12/2025 27-03-2025 <i>Copy of Decision of OJK Board of Commissioners No. Kep-57/ko.12/2025 KEP-57/KO.12/2025</i></p>	<p>Akta RUPS No. 04 Tanggal 28-10-2024 Masa Jabatan 4 Tahun (melanjutkan periode jabatan) <i>Deed of GMS No. 04 Date 28-10-2024 Term of Office 4 Years (continuing the term of office)</i></p>	Indonesia	Indonesia
4	Yogi Gautama Jaelani	Komisaris Anggota	<p>Dalam Proses Uji Kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan <i>In the Process of Fit and Proper Test by the Financial Services Authority</i></p> <p>12 Maret 2025 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No: KEP-47/KO.12/2025 March 12, 2025 <i>Copy of Decision of OJK Board of Commissioners No. Kep-47/ko.12/2025 KEP-47/KO.12/2025</i></p>	<p>Akta RUPS No. 04 Tanggal 28-11-2024 Masa jabatan 4 Tahun <i>Deed of GMS No. 04 Date 28-11-2024 Term of office 4 years</i></p>	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2024 Komisaris Independen efektif mulai tanggal 03 Mei 2024 setelah dinyatakan Lulus Uji Kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti tersebut di atas.

Disamping itu terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, dimana Komisaris Utama berakhir masa jabatannya tanggal 28 Oktober 2024 dan pada saat yang sama Komisaris Independen diusulkan untuk diangkat menjadi Komisaris Utama Independen dan Komisaris Anggota yang keduanya definitif setelah dinyatakan Lulus Uji Kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

During the year 2024 the Independent Commissioner was effective from May 03, 2024 after passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority as mentioned above.

In addition, there is a change in the composition of the Board of Commissioners, where the President Commissioner ends his term of office on October 28, 2024 and at the same time the Independent Commissioner is proposed to be appointed as Independent President Commissioner and Member Commissioner, both of which are definitive after being declared to have passed the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER PROFILE



MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Komisaris Utama
President Commissioner

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Probolinggo, 21 April 1967.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Probolinggo, on April 21, 1967.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Kebijakan Publik di Universitas Padjadjaran tahun 2012.
- S2 Public Administration di University of Birmingham tahun 1995.
- S1 Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung tahun 1990.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar (Perseroda) untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 21 Desember 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: 07, tanggal 21 Desember 2021.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and determined as President Commissioner of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) for the first time based on the Resolution of the GMS dated December 21, 2021 in accordance with the Deed of Statement of Resolution of Shareholders Outside the EGMS of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number: 07, dated December 21, 2021.

PERIODE MENJABAT

21 Desember 2021 -28 Oktober 2024.

PERIOD OF SERVICE

December 21, 2021 - October 28, 2024.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Okt 2023 – sekarang).
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat (2020 – sekarang).
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (2019 – 2020).
- Penjabat Bupati Purwakarta (2018).
- Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (2018).
- Kepala Biro Pemerintahan Dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Barat (2016 – 2017).

EDUCATIONAL BACKGROUND

- *Doctor of Public Policy at Padjadjaran University in 2012.*
- *Master of Public Administration at the University of Birmingham in 1995.*
- *Bachelor of Engineering Planology at the Bandung Institute of Technology in 1990.*

EMPLOYMENT HISTORY

- *Acting Regional Secretary of West Java Province (Oct 2023 - present).*
- *Assistant for the Economy and Development of the Regional Secretariat of West Java Province (2020-present).*
- *Head of the Regional Development Planning Agency of West Java Province (2019-2020).*
- *Acting Regent of Purwakarta (2018).*
- *Head of the Regional Library and Archives Service of West Java Province (2018).*
- *Head of Government and Cooperation Bureau of Regional Secretariat of West Java Province (2016 – 2017).*

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Muhammad Taufiq Budi Santoso has no affiliation with either the other members of the Board of Commissioners, or the Board of Sharia Supervisory, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Muhammad Taufiq Budi Santoso does not own the Company's shares.



MUHAMMAD ISKANDAR

Komisaris Independen
Independent Commissioner

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Banda Aceh, 08 Desember 1970

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Banda Aceh, on 08 December 1970.

RIWAYAT PENDIDIKAN
• University of Maryland Collage Park, USA

EDUCATIONAL BACKGROUND
• *University of Maryland Collage Park, USA*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar (Perseroda) untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2023 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: 39, tanggal 26 November 2019. Dan Definitif setelah dinyatakan Lulus Uji Kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti tersebut di atas tanggal 03 Mei 2024.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed as Independent Commissioner of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) for the first time based on the Resolution of the EGMS dated November 28, 2023 in accordance with the Deed of Minutes of the EGMS of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number: 39, dated November 26, 2019. And definitively after being declared to have passed the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority as mentioned above on May 03, 2024.

PERIODE MENJABAT

28 November 2023 – 28 November 2027
Menjabat Komisaris Independen
28 November 2023 – 28 Pktober 2024
Lulus fnp OJK Mei 2024
Menjabat Komisaris Utama Indepnden
28 Oktober 2024 – 28 November 2027
Lulus fnp OJK Maret 2025

PERIOD OF SERVICE

*November 28, 2023 – November 28, 2027
Served as Independent Commissioner
November 28, 2023 – October 28, 2024
Passed FNP OJK May 2024
Served as Independent President
Commissioner
October 28, 2024 – November 28, 2027
Passed FNP OJK March 2025*

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (2023 - sekarang).
- Direktur Operasional PT Persib Bandung Bermartabat (2024).
- Salah satu pendiri dan Direktur Utama TOP Grup (2014-sekarang)

- Head of Business Advisory dan Head of Asset Management & Investment PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2012-2014).
- President Director (CEO) PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia (1996-2012)

EMPLOYMENT HISTORY

- *Independent Commissioner of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (2023 - present).*
- *Operations Director of PT Persib Bandung Bermartabat (2024).*
- *One of the founders and President Director of TOP Group (2014-present)*
- *Head of Business Advisory and Head of Asset Management & Investment of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2012-2014).*
- *President Director (CEO) of PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia (1996-2012)*

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Iskandar tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Muhammad Iskandar has no affiliation with either the other members of the Board of Commissioners, or the Board of Sharia Supervisory, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Muhammad Iskandar tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Muhammad Iskandar does not own the Company's shares.



YOGI GAUTAMA JANELANI

Komisaris
Commissioner

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bandung 24 Juni 1973

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Bandung 24 June 1973

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S-1 Hukum di Universitas Katolik Parahyangan tahun 1996
- S-2 Magister Ekonomi Pembangunan di Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2004

EDUCATIONAL BACKGROUND

- *Bachelor of Law at Parahyangan Catholic University in 1996*
- *Master's Degree in Development Economics at Bandung Institute of Technology (ITB) in 2004*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat sebagai Komisaris Anggota PT Jamkrida Jabar (Perseroda) untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB sesuai Akta Risalah RUPS PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: 3 tanggal 28 Oktober 2024. Dan Definitif setelah dinyatakan Lulus Uji Kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti tersebut di atas tanggal 12 Maret 2025

APPOINTMENT HISTORY

Appointed as Commissioner Member PT Jamkrida Jabar (Perseroda) for the first time based on the EGMS Resolution in accordance with the Deed of Minutes of GMS of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number: 3 dated October 28, 2024. And Definitive after passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority as mentioned above on March 12, 2025.

PERIODE MENJABAT

- 28 Oktober 2024 – 28 Oktober 2027

PERIOD OF SERVICE

- *October 28, 2024 – October 28, 2027*

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris Anggota PT Jamkrida Jabar (Perseroda)
- Kepala Biro Hukum dan HAM (September 2023 – sekarang)
- Plt Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat (2021)
- Kabag Investasi Daerah dan administrasi Pembangunan (2019 – 2023)

EMPLOYMENT HISTORY

- *Commissioner Member of PT Jamkrida Jabar (Perseroda)*
- *Head of Legal and Human Rights Bureau (September 2023 – present)*
- *Acting Head of BUMD, Investment and Development Administration Bureau of the West Java Provincial Secretariat (2021)*
- *Head of Regional Investment and Development Administration Division (2019 – 2023)*

HUBUNGAN AFILIASI

Yogi Gautama tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Yogi Gautama has no affiliation with either the other members of the Board of Commissioners, or the Board of Sharia Supervisory, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Yogi Gautama tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Yogi Gautama does not own the Company's shares.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a corporate organ that is collectively responsible for supervising and providing direction to the Board of Directors and ensuring that the company implements GCG at all levels of the organization.

All members of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) have met the following criteria:

- a. The appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by the GMS.*
- b. Have met the fit and proper test provisions of the Financial Services Authority, Limited Liability Company Law and related GCG provisions, and have obtained approval from the Financial Services Authority.*
- c. All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence and financial reputation.*
- d. All members of the Board of Commissioners do not take and/or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS.*
- e. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia.*
- f. All members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens.*

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The duties of the Board of Commissioners are:

- 1. Supervise the Company's management policies carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the Company's development plan, the Company's work plan and annual budget, implementation of the provisions of the Articles of Association and GMS decisions as well as the applicable laws and regulations.*

2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
6. Memberikan persetujuan atas keputusan-

2. Carry out duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, GMS Decision,s and applicable laws and regulations.
3. Carry out the interests of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and being responsible to the GMS.
4. Research and review the Quarterly, Semester and Annual Reports prepared by the Board of Directors and sign the report. If the Commissioner refuses to sign the report, then the refusal and the reasons must be stated in writing.
5. Following the development of the Company's activities.
6. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues considered important for the management of the Company.
7. Report immediately to the GMS if there are signs of a decline in the Company's performance.

For the supervisory and advisory functions as referred to above to be carried out effectively, the Board of Commissioners also has the following duties:

1. Provide opinions and advice to management regarding the determination of the vision, mission, culture, and values of the Company.
2. Conduct studies and provide opinions on business strategies that need to be implemented by the Company.
3. Conducting assessments, and providing opinions and advice on human resource management systems.
4. Conduct assessments, and provide opinions and advice on risk control systems.
5. Conduct an assessment and provide opinions and advice on the Draft Business Plan and its elaboration in the Annual Work Plan and Budget.

- keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
 8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
 9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

6. *Provide approval for strategic business decisions which according to laws and regulations and GMS decisions must be approved by the Board of Commissioners.*
7. *Provide an assessment of the reports of internal and external auditors and provide advice to management on matters that need to be followed up.*
8. *Approve the Business Plan (RKAP) submitted by the Directors of the Company after conducting inspections and discussions with the Directors.*
9. *Periodically supervise the implementation of the Business Plan and provide opinion/approval on changes to the Business Plan by applicable regulations.*
10. *Submit monitoring reports to Shareholders.*

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners divides tasks among each member of the Board of Commissioners to specifically supervise certain areas, which are set forth both in the Board of Commissioners Decree and in the resolutions of the Board of Commissioners Coordination Meeting.

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
1	Mohammad Taufiq Budi Santoso	12
2	Muhammad Iskandar	20

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

COMPOSITION OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Keputusan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile
1	Zaini Abdul Malik	Ketua Dewan Pengawas Syariah <i>Chairman of The Board of Sharia Supervisory</i>	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-488/NB.1/2015 <i>Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-488/NB.1/2015</i>	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014 <i>Deed No. 38 dated 28-11-2014</i>	Indonesia	Indonesia
2	Khozin Abu Faqih	Anggota Dewan Pengawas Syariah <i>Member of The Board of Sharia Supervisory</i>	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-488/NB.1/2015 <i>Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-488/NB.1/2015</i>	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014 <i>Deed No. 38 dated 28-11-2014</i>	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2024 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

During 2024 there were no changes to the composition of the Board of Sharia Supervisory.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH BOARD OF SHARIA SUPERVISORY PROFILE



ZAINI ABDUL MALIK

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Board of Sharia Supervisory

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bandung, 31 Januari 1975.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Bandung, on January 31, 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2022.
- S2 Kajian Islam/Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.
- S1 pada Fakultas Syariah/ Muamalah di Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: 38, tanggal 28 November 2014.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Chairman of the Board of Sharia Supervisory of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Sharia Business Unit for the first time based on the EGMS Decision on November 28, 2014, according to the Deed of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) EGMS Minutes Number: 38 dated November 28, 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

PERIOD OF SERVICE

Since November 28, 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sampai dengan sekarang.
- Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW. Muhammadiyah Jawa Barat (Periode 2010 – 2015)
- Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (2002 – 2003).
- Penulis karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

EMPLOYMENT HISTORY

- *Lecturer at the Faculty of Syari'ah at the Islamic University of Bandung (UNISBA) until now.*
- *Member of the PW Tarjih and Tajdid Council. Muhammadiyah West Java (Period 2010 – 2015)*

EDUCATIONAL BACKGROUND

- *Doctoral degree at Sunan Gunung Djati State Islamic University in 2022.*
- *Master of Islamic Studies/Islamic Economics at State Islamic University/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 2008.*
- *Bachelor of Sharia/Muamalah Faculty at the State Islamic Institute/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung in 1999.*

- *Chairman of the Jakarta Syari'ah Economic Forum (2002 – 2003).*
- *Author of scientific works on Islamic Economics/Sharia Economics.*

HUBUNGAN AFILIASI

Zaini Abdul Malik tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Zaini Abdul Malik has no affiliation with other members of the Board of Sharia Supervisory, nor the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Zaini Abdul Malik tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Zaini Abdul Malik does not own the Company's shares.



KHOZIN ABU FAQIH

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Board of Sharia Supervisory

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Gresik, 08 September 1969.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Gresik, on September 08, 1969.

RIWAYAT PENDIDIKAN
Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA/Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh Cabang Jakarta) tahun 1996.

EDUCATIONAL BACKGROUND
Graduated from Sharia Faculty at the Institute of Islamic and Arabic Sciences (LIPIA/Imam Muhammad bin Saud Riyadh Islamic University Jakarta Branch) in 1996.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) No. 38 tanggal 28 November 2014.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Member of the Board of Sharia Supervisory of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Sharia Business Unit for the first time based on the EGMS Decision on November 28, 2014, according to the Deed of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) EGMS Minutes Number: 38 dated November 28, 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

PERIOD OF SERVICE

Since November 28, 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pimpinan Pesantren Qur'an Atarbiyah Pusat Layanan Pendidikan (PULPEN).
- Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah (2013 – sekarang).
- Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010 – 2012).
- Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung tahun (2000 – 2009).
- Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994 – 1996).
- Penulis dan penerjemah buku-buku Islam

EMPLOYMENT HISTORY

- *Leaders of the Pesantren Qur'an Atarbiyah Education Service Center (PULPEN).*
- *Caretaker of Al-Ibda' Innovative Islamic Boarding School and Al-Ilham Islamic Boarding School/Sharia Banking Vocational School (2013 – present).*

- *MQFM Islamic Insights Study Filler (2010 – 2012).*
- *Lecturer at Ma'had Al-Imarat Bandung (2000 – 2009).*
- *Lecturer in Ma'had Salahuddin Bogor (1994 – 1996).*
- *Author and translator of Islamic books.*

HUBUNGAN AFILIASI

Khozin Abu Faqih tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Khozin Abu Faqih has no affiliation with either the other Members of the Board of Sharia Supervisory or the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Khozin Abu Faqih tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

Khozin Abu Faqih does not own the Company's shares.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memegang peranan penting bagi Perseroan sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b. Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan;
 - c. Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan.
3. Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

The Board of Sharia Supervisory is an independent body recommended by the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and plays an important role for the Company as a supervisor for the application of Sharia principles in every operational activity of the Sharia Business Unit.

Duties and Responsibilities of the Board of Sharia Supervisory

Duties and authorities of the Board of Sharia Supervisory:

1. *The Board of Sharia Supervisory has the duty and authority to provide advice and suggestions to the Board of Directors, supervise the Sharia aspects of the operational activities of the Company's Sharia Business Unit, as well as act as a representative of the Company's Sharia Business Unit at the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.*
2. *The implementation of supervisory duties and providing advice and suggestions carried out by the Board of Sharia Supervisory as referred to above is carried out on:*
 - a. *Sharia Guarantee Activities;*
 - b. *Sharia Guarantee Contract marketed by the Company's Sharia Business Unit;*
 - c. *Sharia Guarantee marketing practice carried out by the Company's Sharia Business Unit.*
3. *The Board of Sharia Supervisory is entitled to obtain complete and timely information from the Board of Directors regarding the Company's Sharia Business Units.*

If the Board of Sharia Supervisory assesses that there are policies or actions of members of the Board of Directors related to the matters referred to in paragraph 2 that are not by Sharia Principles, the Board of Sharia Supervisory is obliged to ask for an explanation from members

kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

of the Board of Directors regarding policies or actions of members of the Board of Directors that are not by the Principles Sharia.

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Frequency of meeting of the Board of Sharia Supervisory held in 1 (one) year

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun".

By POJK No.3/POJK.05/2017, regarding Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 40 that "BSS is required to hold BSS meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year".

Selama tahun 2024 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 6 (enam) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

During 2024, 6 (six) BSS meetings were held, with the following attendance figures:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
1	Zaini Abdul Malik	6
2	Khozin Abu Faqih	6

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 Tentang Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Dewan Komisaris disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

1. Komite Audit

- a. PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagai Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional wajib membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor: 3/POJK.05/2017/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 29 ayat (1).
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: KEP-0001/DEKOM/JJ/II/2020 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Audit, membentuk Komite Audit PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dan mengangkat:
 - 1) Muhammad Iskandar (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit.
 - 2) Prima Yusi Sari sebagai Anggota Komite Audit.
dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMPANY COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 concerning Company Committees Under the Board of Commissioners, Article 2 Components of Company Committees under the Board of Commissioners states that:

The Company's Committees under the Board of Commissioners consist of:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee; and
3. Risk Monitoring and Corporate Governance Committee.

1. Audit Committee

- a. PT Jamkrida Jabar (Perseroda) as a Guarantee Institution that has a national operational area is required to form an Audit Committee as stated in POJK Number: 3/POJK.05/2017/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions Article 29 paragraph (1).
- b. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number: KEP-0001/DEKOM/JJ/II/2020 concerning the Establishment and Appointment of the Audit Committee, form the Audit Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) and appoint:
 - 1) Muhammad Iskandar (Independent Commissioner) as Chair of the Audit Committee.
 - 2) Prima Yusi Sari as a Member of the Audit Committee. Each term of office commences from January 2, 2024 to December 31, 2027.

Baik Ketua maupun Anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi.

Both the Chairman and Members of the Audit Committee have expertise in accounting.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

c. *Duties and Responsibilities of the Audit Committee*

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that include at least:

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
- 2) Memberikan usulan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa pelaksanaan audit;
- 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- 4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara

- 1) *Assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and implementation of the duties of the internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits to assess the adequacy of internal controls include the financial reporting process;*
- 2) *Provide suggestions for prospective external auditors to the Board of Commissioners to be appointed and determined by the General Meeting of Shareholders, based on independence, the scope of the assignment, and audit fees;*
- 3) *Reviewing the financial information that will be released by the Company to the public and or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;*
- 4) *Conduct a review of compliance with laws and regulations;*
- 5) *Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the external auditor regarding the services provided;*

- manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
 - 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- 6) *Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;*
- 7) *Examine complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;*
- 8) *Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;*
- 9) *Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.*

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

d. Frequency of Audit Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
1	Muhammad Iskandar	4
2	Prima Yusi Sari	4

e. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

e. Audit Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Mengulas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal (SPI) 2024 <i>Reviewing the 2023 Annual Supervision Work Program of the Internal Supervisory Unit (ISU).</i>	Terlaksana <i>Done</i>
2	Pemantauan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI Triwulanan <i>Monitoring of the ISU Quarterly Annual Supervision Work Program</i>	Terlaksana <i>Done</i>

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 2024

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
3	Mengulas Kinerja Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan <i>Reviewing Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Financial Performance</i>	Terlaksana <i>Done</i>
4	Penyusunan Program Kerja Komite Audit 2025 <i>Compilation of the 2024 Audit Committee Work Program</i>	Terlaksana <i>Done</i>
5	Pemantauan Proses Audit Eksternal <i>External Audit Process Monitoring</i>	Terlaksana <i>Done</i>
6	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Laporan Keuangan 2023 <i>Follow-up Monitoring of Public Accounting Firm (KAP) Audit Findings on the 2022 Financial Report</i>	Terlaksana <i>Done</i>
7	Pembahasan Hasil Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023 oleh KAP <i>Discussion of the Audit Results of the Company's 2022 Financial Statements by KAP</i>	Terlaksana <i>Done</i>
8	Mengulas RKAP 2025 <i>Reviewing the 2024 Business Plan</i>	Terlaksana <i>Done</i>
9	Mengevaluasi Kinerja KAP dan Memberikan Rekomendasi Pengajuan KAP untuk Audit Laporan Keuangan 2024 <i>Evaluating KAP Performance and Providing KAP Submission Recommendations for the 2023 Financial Report Audit</i>	Terlaksana <i>Done</i>
10	Mengulas Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2024 <i>Reviewing the 2023 Financial Report Prognosis</i>	Terlaksana <i>Done</i>
11	Melakukan Penilaian Tata Kelola Perusahaan <i>Conduct Corporate Governance/CG Assessment</i>	Terlaksana <i>Done</i>
12	Sesi Berbagi dan Diskusi dengan OJK dan Jamkrida lain <i>Sharing and Discussion with OJK and other Jamkrida</i>	Terlaksana <i>Done</i>

PROFIL KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE PROFILE

MUHAMMAD ISKANDAR

Ketua Komite Audit

Chair of the Audit Committee



PRIMA YUSI SARI

Anggota Komite Audit

Audit Committee Member

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Palembang, 24 Agustus 1975.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Palembang, on August 24, 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2023.
- S2 Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000.
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1998.

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

EDUCATIONAL BACKGROUND

- *Doctor of Accounting Science at the Padjadjaran University in 2023.*
- *Master of Management Science at the University of Indonesia in 2000.*
- *Bachelor of Accounting at Padjadjaran University in 1998.*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023. Dan diangkat Kembali pada 02 Januari 2024.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and determined as a Member of the Audit Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) from January 6, 2020 to December 31, 2023. And reappointed on January 2, 2024

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (1999 – sekarang).
- Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI Wilayah Jawa Barat) (Oktober 2023 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013 – 2020).
- Anggota Komite Audit PT BUMN Hijau Lestari I (2015 – 2016).

EMPLOYMENT HISTORY

- *Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (1999 – present).*
- *Member of the Audit Committee of PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013 – 2020).*
- *Member of the Audit Committee of PT BUMN Hijau Lestari I (2015 – 2016).*

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Selain Komite Audit, Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dan mengangkat:
 - 1) Muhammad Iskandar (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 2) Wa Ode Zusnita Muizu sebagai Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 3) Kepala Divisi Keuangan dan Umum (ex Officio) sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023. Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang akuntansi. Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang ilmu manajemen.

- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

2. *Nomination and Remuneration Committee*

- a. *Apart from the Audit Committee, the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) may form other committees to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.*
- b. *Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number:KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/ 2021 concerning the Establishment and Appointment of the Nomination and Remuneration Committee, form the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) and appoint:*

- 1) *Muhammad Iskandar (Independent Commissioner) as Chair of the Nomination and Remuneration Committee.*
- 2) *Wa Ode Zusnita Muizu as Independent Member of the Nomination and Remuneration Committee.*
- 3) *Head of Finance and General Division (ex Officio) as Member of the Nomination and Remuneration Committee.*

with their respective terms of office starting from August, 02, 2020, to December, 31, 2023. The Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee have expertise in accounting. Independent members of the Nomination and Remuneration Committee have expertise in management.

- c. *Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee*

In carrying out its functions, the Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities that include at least:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - d) Struktur remunerasi;
 - e) Kebijakan atas remunerasi;
 - f) Besaran atas remunerasi.
 - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
 - 5) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 6) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 1) *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a) *Position composition of members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, and or BSS;*
 - b) *Policies and criteria required in the Nomination process;*
 - c) *Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, and or BSS;*
 - d) *Remuneration structure;*
 - e) *Policy on remuneration;*
 - f) *Amount of remuneration.*
 - 2) *Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or Board of Sharia Supervisory based on benchmarks that have been prepared as evaluation material;*
 - 3) *Assist the Board of Commissioners in assessing target achievement and performance according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS;*
 - 4) *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity-building programs for members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS;*
 - 5) *Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and or*

Board of Commissioners and or BSS to submit to the GMS;
6) Evaluate the structure, policies, and amount of remuneration at least 1 (once) time in 1 (one) year.

d. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

d. Frequency of Nomination and Remuneration Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
1	Muhammad Iskandar	3
2	Wa Ode Zusnita Muizu	3
3	Kepala Divisi Keuangan dan Umum (ex Officio)	2

e. Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Realisasinya

e. Nomination and Remuneration Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Penyusunan kajian dan Rekomendasi mengenai Tantiem, Tunjangan pendidikan dan pedoman Pengadaan Barang dan Jasa <i>Preparation of studies and recommendations regarding bonuses, educational allowances and guidelines for the procurement of goods and services</i>	Terlaksana <i>Done</i>
2	Melakukan Review terhadap Self Assesment Calon Pengurus Perusahaan <i>Conducting a Review of the Self-Assessment of Prospective Company Managers</i>	Terlaksana <i>Done</i>
3	Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 <i>Preparation of the 2023 Board of Commissioners Supervisory Report</i>	Terlaksana <i>Done</i>
4	Review Kinerja SDM Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan <i>Monthly, Quarterly, Semester and Annual HR Performance Review</i>	Terlaksana <i>Done</i>
5	Penyusunan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Tahun 2024 <i>Preparation of the Nomination and Remuneration Committee Work Program for 2024</i>	Terlaksana <i>Done</i>

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PROFILE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

MUHAMMAD ISKANDAR

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee



WA ODE ZUSNITA MUIZU

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Kendari, 14 Oktober 1977

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Kendari, October 14, 1977

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Manajemen di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008
- S2 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2004.
- S1 Manajemen di Universitas Halu Oleo tahun 2000.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- *Doctoral Degree in Management at Padjadjaran University in 2008.*
- *Master of Management at Padjadjaran University in 2004.*
- *Bachelor of Management at Halu Oleo University in 2000.*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak tanggal 02 Agustus 2020.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) from August 2, 2020.

RIWAYAT PEKERJAAN

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (s.d. sekarang).

EMPLOYMENT HISTORY

Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (until now).



MUJI ROHMAD

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bantul, 15 Agustus 1970

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Bantul, August 15, 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN
D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1998.

EDUCATIONAL BACKGROUND
D4 Accounting at the State College of Accountancy (STAN) in 1998.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak tanggal 02 Agustus 2020.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) from August 2, 2020.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kepala Divisi Keuangan dan Umum PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (2018 – sekarang).
- Manajer Umum Keuangan PT Lintas Media Telekomunikasi (2014 – 2018).
- Kepala Divisi Keuangan, Akunting, & Perpajakan Bosowa Resources Group, PT Bosowa Resources, PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara (2010 – 2013).
- HMD Consulting (2010).
- Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (2000 – 2009).

EMPLOYMENT HISTORY

- *Head of Finance and General Affairs Division of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (2018 – present).*
- *Finance General Manager of PT Lintas Media Telekomunikasi (2014 – 2018).*
- *Head of Finance, Accounting & Taxation Division Bosowa Resources Group, PT Bosowa Resources, PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara (2010 – 2013).*
- *HMD Consulting (2010).*
- *Auditor at BPKP Representative Office of South Sulawesi Province (2000 – 2009)*

3. Komite Pemantau Risiko

a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, membentuk Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dan mengangkat:

- 1) Muhammad Iskandar (Komisaris Utama) sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
- 2) Dini Wahjoe Hapsari sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2026.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
- 3) Membantu Dewan Komisaris dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholders* dan pegawai Perseroan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha perusahaan;
- 4) Mendukung terwujudnya budaya Perusahaan yang berdasarkan prinsip transparansi,

3. Risk Monitoring Committee

a. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Number: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/ 2022 dated March 1 2022 concerning the Formation and Appointment of the Risk Monitoring Committee, formed the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) and appointed:

- 1) Muhammad Iskandar (President Commissioner) as Chair of the Risk Monitoring Committee.
- 2) Dini Wahjoe Hapsari as Member of the Risk Monitoring Committee.

each term of office commencing from 01 March 2022 to 01 March 2026.

b. Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

- 1) Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Company policies;
- 2) Monitor and evaluate the implementation of the duties of the risk management committee and the risk management work unit;
- 3) Assisting the Board of Commissioners in creating a conducive working climate and becoming a means for *stakeholders* and employees of the Company to report matters that can cause corporate losses, both financial and non-financial, which can damage the image and sustainability of the company's business;
- 4) Supporting the realization of a corporate culture based on the principles of transparency,

- akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan;
- 5) Menerima laporan/pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar. Kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Perseroan;
 - 6) Melakukan penelaahan lebih lanjut atas informasi dan laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 - 7) Memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*) antara lain jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor, isi laporan, perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, pemutusan hubungan kerja, penurunan jabatan, pelecehan, diskriminasi, catatan yang merugikan, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya;
 - 8) Memberikan informasi perkembangan pelaporan tindakan pelanggaran hanya kepada Dewan Komisaris/Direksi dan kepada pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari pelapor yang bersangkutan;
 - 9) Memberikan keputusan tindak lanjut laporan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan;
 - 10) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait dalam rangka perbaikan system dan
- accountability, responsibility, independence and fairness;*
- 5) *Receiving reports/complaints/ providing information submitted either directly or indirectly in connection with alleged acts that violate laws, regulations/ standards. Code of ethics, and policies, as well as other similar actions in the form of direct threats to the public interest, as well as Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) that occur within the Company;*
 - 6) *Conduct a further review of the information and reports of alleged violations received;*
 - 7) *Protecting the whistleblower, including guarantees for the confidentiality of the complainant's identity, report contents, protection against the possibility of threats, intimidation, punishment, termination of employment, demotion, harassment, discrimination, adverse records, or unpleasant actions other;*
 - 8) *Provide information on the progress of reporting violations only to the Board of Commissioners/Directors and the reporter accompanied by a written request from the reporter concerned;*
 - 9) *Provide decisions on follow-up reports based on sufficient and reliable evidence;*
 - 10) *Provide recommendations to related work units to improve systems and work processes accompanied by supporting documents;*
 - 11) *Reporting the implementation of monitoring the implementation and enforcement of GCG to the*

- proses kerja disertai dengan dokumen-dokumen pendukung;
- 11) Melakukan pelaporan penyelenggaraan pemantauan penerapan dan penegakan GCG kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 12) Melakukan evaluasi atas efektifitas pedoman whistleblowing system dan penerapannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
 - 13) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 14) Menjaga kerahasiaan dokumen, data informasi Perusahaan.

- Board of Commissioners and Directors;*
- 12) Evaluate the effectiveness of the whistleblowing system guidelines and their application to the Board of Commissioners and Directors*
 - 13) Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;*
 - 14) Maintain the confidentiality of documents, Company information data.*

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

c. Frequency of Risk Monitoring Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
1	Mohammad Taufiq Budi Santoso	2
2	Subarman Basarah	2
3	Dini Wahjoe Hapsari	4

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

d. Risk Monitoring Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Melakukan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan <i>Evaluating Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Financial and Non-Financial Performance</i>	Terlaksana <i>Done</i>
2	Melakukan Evaluasi Profil Risiko secara berkala <i>Evaluating the Risk Profile of Credit Schemes on a Quarterly Basis</i>	Terlaksana <i>Done</i>
3	Pendampingan penyusunan Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan <i>Assistance in the preparation of Company Risk Management Policies and Guidelines</i>	Terlaksana <i>Done</i>

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 2024

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
4	Mengawasi Kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan regulator <i>Monitor Compliance with regulatory policies and requirements</i>	Terlaksana <i>Done</i>
5	Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko untuk Tahun 2025 <i>Compilation of the Risk Monitoring Committee Work Program for 2023</i>	Terlaksana <i>Done</i>

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO *PROFILE OF RISK MONITORING COMMITTEE*

MUHAMMAD ISKANDAR

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee



PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Program Diploma Oracle8i DBA dan Software Analyst di Pusat Teknologi Informasi Princeton, Glenside, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2003.
- S1 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung tahun 1994.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- *Diploma Program in Oracle8i DBA and Software Analyst at Princeton Information Technology Center, Glenside, Pennsylvania, USA in 2003.*
- *Bachelor of Science in Environmental Engineering at Institut Teknologi Bandung, in 1994.*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak tanggal 01 Maret 2022 berakhir sampai dengan 30 April 2024.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and determined as a Member of the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) since March 1, 2022 ending until April 30, 2024

SUBARMAN BASARAH

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Surabaya, 25 Juni 1970

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Surabaya, on June 25, 1970

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (Mar 2022 – April 2024).
- Direktur Marketing dan Pengembangan Usaha PT Abhirama Kresna – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- Direktur PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- General Manager PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda (Mar 2013 – Sep 2017).
- Staf Ahli Direksi PT Arkon Prima Indonesia (Mar 2013 – Feb 2014).

EMPLOYMENT HISTORY

- *Member of the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (March 2022 – April 2024).*
- *Director of Marketing and Business Development of PT Abhirama Kresna – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).*
- *Director of PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).*
- *General Manager of PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda (Mar 2013 – Sep 2017).*
- *Expert Staff to the Board of Directors of PT Arkon Prima Indonesia (Mar 2013 – Feb 2014).*



DINI WAHJOE HAPSARI

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Probolinggo 12 Jan 1972

PLACE AND DATE OF BIRTH
Probolinggo 12 Jan 1972

RIWAYAT PENUNJUKAN
Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak tanggal 06 Juni 2024.

APPOINTMENT HISTORY
Appointed and appointed as a Member of the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) since June 6, 2024.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Doktor Ilmu Akuntansi (DIA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
- S2 Magister Sains Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
- S1 Sarjana Ekonomi – Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- *S3 Doctor of Accounting Science (DIA) Faculty of Economics and Business, Padjajaran University*
- *S2 Master of Science in Accounting Science, Faculty of Economics and Business, Padjajaran University*
- *S1 Bachelor of Economics – Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Padjajaran University*

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (Juni 2024).
- Dosen dan Peneliti Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Telkom (s.d Sekarang)

EMPLOYMENT HISTORY

- *Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) (June 2024).*
- *Lecturer and Researcher of the Master of Accounting Program, Faculty of Economics and Business - Telkom University (until now)*

4. Kewenangan Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, dan informasi tentang pegawai, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Divisi yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS.
- d. Apabila diperlukan, Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- e. Apabila diperlukan, Komite dapat membentuk tim yang bersifat *ad-hoc* dengan kriteria dan periode pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan Di Bawah Direksi, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Direksi disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Direksi terdiri atas:

1. Komite Investasi;
2. Komite Penjaminan;

4. Authority of the Company's Committees Under the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Company's Committees Under the Board of Commissioners have the following powers:

- a. *Access all documents, records, and information about employees, funds, assets, and resources of the Company related to the implementation of their duties and functions.*
- b. *Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, BSS, Division that manages Human Resources (HR), employees, and other related parties.*
- c. *Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS.*
- d. *If necessary, the Committee may involve experts and or consultants/independent parties needed to assist in carrying out their duties, by obtaining written approval from the Board of Commissioners.*
- e. *If necessary, the Committee may form an ad-hoc team with the criteria and implementation period adjusted to the needs and type of work.*

COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMPANY COMMITTEES UNDER THE DIRECTORS

Based on the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 concerning Company Committees Under the Board of Directors, Article 2 Components of Company Committees Under the Board of Directors states that:

The Company's Committees under the Board of Directors consist of:

1. *Investment Committee;*
2. *Guarantee Committee;*

- | | |
|---|--|
| <p>3. Komite Klaim; dan</p> <p>4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan.</p> | <p>3. <i>Claims Committee; And</i></p> <p>4. <i>Employee Nomination and Remuneration Committee.</i></p> |
| <p>1. Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:</p> <p>a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>b. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan</p> <p>c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.</p> | <p>1. <i>The Investment Committee consists of at least 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairperson doubles as a member, who is the Director of Finance, as well as other members who may come from:</i></p> <p><i>a. President Director for an investment value of more than IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah);</i></p> <p><i>b. Division Heads and/or Section Heads in charge of Finance and General Affairs functions; And</i></p> <p><i>c. Head of Division and/or Head of Section in charge of the Risk Management function.</i></p> |
| <p>2. Komite Penjaminan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Penjaminan dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan berikut perubahannya, serta Keputusan Direksi Nomor: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Kafalah dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) serta Sertifikat Kafalah berikut perubahannya.</p> | <p>2. <i>The Guarantee Committee consists of at least 3 (three) members, with membership requirements as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 concerning Authority to Decide Guarantees and Sign Guarantee Principle Approval Letters (SP3) as well as Guarantee Certificates and their amendments, as well as Directors Decree Number: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 concerning Authority to Decide on Kafalah and Sign Kafalah Principle Approval Letters (SP2K) as well as Kafalah Certificates and their amendments.</i></p> |
| <p>3. Komite Klaim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan anggota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 tentang Wewenang Memutuskan dan Menandatangani Keputusan Klaim Kredit, yaitu:</p> <p>a. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan:</p> <p>1) Sampai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk semua jenis kredit, termasuk kredit pola potong gaji,</p> | <p>3. <i>The Claims Committee consists of at least 3 (three) members, with the provisions of members as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 concerning Authority to Decide and Sign Credit Claims Decisions, namely:</i></p> <p><i>a. That the application for a credit claim for each Guaranteed with the number of submissions:</i></p> <p><i>1) Up to an amount of IDR 50,000,000.00 (fifty million</i></p> |

baik kredit pola potong gaji secara langsung maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).

- 2) Sampai dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit konstruksi/pengadaan barang.

Komite Klaim diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim dengan beranggotakan Kepala Divisi Penjaminan dan Kepala Divisi Keuangan & Umum.

- b. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Keuangan, dengan beranggotakan Direktur Operasional, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
 - c. Bahwa Permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan masalah khusus lainnya yang memerlukan keputusan bersama Direksi, maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Utama, dengan beranggotakan Direksi secara lengkap, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur

rupiahs) for all types of credit, including salary deduction credit, both direct salary deduction credit and through Kopkar/Koppeg disbursed by Collateral Recipients (Banks and Non-Banks)).

- 2) *Up to an amount of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs) for construction/procurement loans.*

The Claims Committee is chaired by the Head of the Risk & Claims Management Division and consists of the Head of the Guarantee Division and the Head of the Finance & General Affairs Division.

- b. *Whereas the application for a credit claim for each Guaranteed with the number of claims submitted as mentioned in point up to an amount of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs), the Claims Committee is chaired by the Director of Finance, with members consisting of the Director of Operations, Head of Guarantee Division, Head Finance & General Affairs Division, as well as Head of Risk & Claim Management Division.*
 - c. *Whereas the application for credit claims for each Guaranteed with a total claim submission of more than IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) and other special issues that require a joint decision of the Board of Directors, the Claims Committee is chaired by the Main Director, with full members of the Board of Directors, Head Guarantee Division, Head of Finance & General Affairs Division, and head of Risk & Claim Management Division.*
4. *The Employee Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairperson also serves as a*

Kuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:

- a. Direksi;
- b. Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.

member, who is the Director of Finance, and other members may come from:

- a. Directors;*
- b. Head of Division or Head of Section and or Staff in charge of the Human Resources (HR) management function;*
- c. Head of Division or Head of Section who represents each Division in the Company.*

5. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Direksi

- 5. Work programs related to the duties and responsibilities of the Committees under the Board of Directors*

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 concerning Company Committees under the Board of Directors, the duties and responsibilities of other committees are as follows:

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:

- 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
- 2) Menelaah dan memberikan saran kepala Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- 3) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- a. The duties and responsibilities of the Investment Committee include:*

- 1) Assisting the Board of Directors in formulating investment policies and supervising the implementation of the investment policies that have been set;*
- 2) Review and provide advice to the head of the Board of Directors regarding potential conflicts of interest in the Company;*
- 3) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.*

- b. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:

- 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan;
- 2) Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan;

- b. The duties and responsibilities of the Guarantee Committee include:*

- 1) Assisting the Board of Directors in formulating guarantee operational policies, supervising and implementing established guarantee operational policies;*
- 2) Conduct feasibility analysis and risk management of each application for guarantee;*
- 3) Provide guarantee decisions;*
- 4) Sign SP3 and SP on behalf of the Guaranteed/Debtor;*

- 3) Memberikan keputusan penjaminan;
 - 4) Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur;
 - 5) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:
- 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim;
 - 3) Memberikan keputusan klaim;
 - 4) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- d. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:
- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
 - a) Nominasi promosi, mutasi, demosi bagi Karyawan;
 - b) Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau *variable*;
 - c) Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
 - d) Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
 - 2) Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
- 5) *Review and provide advice to the Board of Directors regarding potential conflicts of interest in the Company;*
 - 6) *Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.*
- c. *The Claims Committee's duties and responsibilities include:*
- 1) *Assisting the Board of Directors in formulating claim policies and supervising the implementation of established claim policies;*
 - 2) *Perform feasibility analysis and risk management of each claim submission;*
 - 3) *Provide a claim decision;*
 - 4) *Review and provide advice to the Board of Directors regarding the potential conflict of interest of the Company;*
 - 5) *Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.*
- d. *The duties and responsibilities of the Employee Nomination and Remuneration Committee include:*
- 1) *Provide recommendations to the Board of Directors regarding:*
 - a) *Promotion nominations, transfers, and demotions for employees;*
 - b) *Remuneration structure for Employees which includes salaries, incentives, and or fixed and or variable benefits;*
 - c) *Policy on remuneration for employees;*
 - d) *Amount of remuneration for employees.*
 - 2) *Assisting the Board of Directors in assessing target achievement and performance by the remuneration received by each employee;*

- 3) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- 3) *Evaluate the structure, policies, and amount of remuneration at least 1 (once) time in 1 (one) a year;*
- 4) *Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.*

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE, INTERNAL AUDITOR, AND EXTERNAL AUDITOR FUNCTIONS

1. Fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal

- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

1) Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Petugas Kepatuhan).

Tugas dan Kewenangan:

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.

1. Compliance function

- a. *Member of the Board of Directors in charge of the compliance function*

President Director

- b. *Work units or employees carrying out the compliance function*

Corporate Secretary and Internal Supervisory Unit

- c. *Implementation of compliance with laws and regulations*

1) *Corporate Secretary:*

The intention of official position: Enforce compliance with industry authority regulations and the provisions of Good Corporate Governance (Compliance Officer).

Duties and Authorities:

- a) *Publish the latest information about the Company in various media, both print and electronic*
- b) *Facilitate the recording and storage of minutes of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners meetings.*

- c) Menyelenggarakan Rapat Manajemen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Mengikuti perkembangan bisnis inti perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan.
- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

- c) *Organizing Management Meetings, Board of Directors and Board of Commissioners meetings (Management Meetings) and General Shareholders Meetings.*
- d) *Follow the development of the company's core business, especially changes to laws and regulations.*
- e) *Provide advice to the Board of Directors regarding compliance with applicable regulatory provisions.*

2) Satuan Pengawas Internal (SPI)

Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan:

- a) Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan SPI dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
- b) Merencanakan dan membuat program audit, menjadwalkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan.

2) *Internal Supervisory Unit (ISU)*

The intention of the official position:

Assisting the Board of Directors in planning, managing, supervising, and controlling operational and financial audit activities as well as SOP preparation activities in the Company within the limits of applicable government standards and regulations to ensure compatibility between implementation and existing standards and or regulations.

Duties and Authorities:

- a) *Designing, proposing, implementing, and evaluating SPI program/policy plans to support the achievement of company goals.*
- b) *Plan and create an audit program, and schedule audit implementation to ensure compliance with the expected regulations/procedures/efficiency/management control functions.*
- c)

- c) Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi.
- d) Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
- e) Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya.
- f) Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
- g) Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP Unit Kerja SPI.
- h) Melaksanakan dan mengawasi penerapan GCG di bidang tugasnya.
- d) *Supervise and monitor operational activities, analyze, examine, report, and provide recommendations to ensure compliance with procedures and improve efficiency.*
- e) *Supervise and monitor financial activities, analyze, examine, report, and provide recommendations to ensure that the distribution of cash and its use is by procedures and efficiently.*
- f) *Coordinate with related departments in preparing standard operating procedures and procedures (SOP); manage and monitor its implementation to ensure the existence and suitability of its implementation.*
- g) *Control & monitor the implementation of program audits and report audit findings to management accompanied by recommendations for improvement.*
- h) *Formulating, compiling, proposing, and implementing policies, systems, and procedures, as well as SOP Work Unit ISU.*
- i) *Carry out and supervise the implementation of GCG in their respective fields of work.*

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 2024

a. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

a. Company Financial Soundness Level

The company has an adequate level of financial soundness, with the parameters of liquidity ratios, gearing ratios, profitability ratios, and good corporate governance self-assessments, as stated in the table below:

No. No.	Jenis Rasio Ratio Type	Tahun 2024 Year 2024
1	LIKUIDITAS <i>Liquidity</i>	
a.	Current Ratio <i>Current Ratio</i>	417,21%
2.	GEARING RATIO	
a.	Gearing Ratio Produktif <i>Productive Gearing Ratio</i>	9,47 Kali/Times
b.	Total Gearing Ratio <i>Total Gearing Ratio</i>	29,21 Kali/Times
3.	RENTABILITAS <i>Profitability</i>	
a.	Rasio Return on Asset (ROA) <i>Return on Assets (ROA) Ratio</i>	1,68%
b.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) <i>Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO)</i>	102,58%
c.	Rasio Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa <i>Claims to Compensation Revenue Ratio</i>	83,70%
4.	Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance Self-Assessment</i>	
<p>Hasil penilaian sendiri tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mendapatkan nilai 91,99 (sembilan puluh satu koma Sembilan puluh Sembilan) dengan predikat "Sangat Baik", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin.</p> <p><i>The results of the self-assessment of good corporate governance PT Jamkrida Jabar (Perseroda) scored 91.99 (ninety one point ninety nine) with the title "Very Good", by the Financial Services Authority Circular Letter Number 54/SEOJK.05/2017 concerning Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.</i></p>		

- b. Unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen

- b. *Work units or functions that handle and resolve consumer complaints*

No. No.	Penanggung Jawab <i>Person Responsible</i>	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi <i>Head of Work Unit/Executor of Functions</i>
1	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manajemen Risiko & Klaim <i>Head of Risk & Claim Management Division</i>
2	Irwan Budhi Setiawan	Sekretaris Perusahaan (sampai dengan Juni 2024) <i>Corporate Secretary (until June 2024)</i>
3	Miranti Setiani	Sekretaris Perusahaan (dari Juli 2024) <i>Corporate Secretary (from July 2024)</i>
4	Fahmi Jamiul Ulum	Kabag. Unit Usaha Syariah <i>Head of Sharia Business Unit Section</i>

2. Fungsi Auditor Internal (SPI)

2. *Internal Auditor Function (ISU)*

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

The effectiveness and scope of implementation of the duties of the internal auditors in assessing all aspects and elements of activities.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

- 1) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
- 2) Melaksanakan audit operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
- 4) Melaksanakan audit kinerja atas

a. *Scope of audit work*

- 1) *Examine and assess to ensure that the Company's internal control system is adequate, and functions effectively, efficiently, and economically in achieving the goals and objectives of the Company, ensuring the reliability of financial information and operational information as well as maintaining and protecting the Company's assets.*
- 2) *Carry out operational and compliance audits of management activities aimed at assessing the efficiency and effectiveness of company operations, reliability of company information and reporting, and compliance with laws and regulations.*
- 3) *Carry out follow-up audits (special audits) on cases that have indications of fraud.*
- 4) *Carry out a performance audit on the work plan and program of*

perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.

- 5) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
- 6) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

- 1) SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
- 2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
- 3) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

- 1) SPI secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:
 - a) Kepala SPI harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan,

each work unit and assess its conformity with company goals and assess risk management.

- 5) *Carry out special/additional assignments that are relevant to the scope of ISU tasks.*
- 6) *The scope and frequency of audits conducted by ISU depend on certain situations and conditions such as the results of previous audits, the materiality of the risk level surrounding an activity, the adequacy of internal controls, and the availability of ISU resources.*

b. *The structure or position of the internal audit work unit*

- 1) *ISU is directly under the President Director.*
- 2) *ISU is led by a Head of SPI.*
- 3) *The Head of ISU is appointed and dismissed by the President Director.*

c. *Internal auditor independence*

- 1) *ISU organizationally and personally must be independent of the activity being audited so that it can provide impartial and prejudiced opinions and recommendations in the implementation and reporting of the audit. Independence can be achieved through position in the company and auditor objectivity, namely:*
 - a) *The Head of ISU must be placed in a position directly under the Main Director so that the implementation of the internal audit has the full support of the Board of Directors and the company's work units, without the interference of any party;*

- tanpa campur tangan pihak manapun;
- b) SPI tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
 - c) SPI harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - d) SPI dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- 2) SPI dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
- a) SPI harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - b) SPI harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait.
- b) *ISU is not allowed to be involved in operational activities which include planning, development, implementation, and reporting of company work units to ensure the credibility of the results of their supervision.*
 - c) *ISU must be free from the intervention of any party in determining the scope of work, and execution of work, as well as in communicating audit results to the authorities.*
 - d) *ISU is prohibited from having a sense of fear, loyalty, and ambition that can affect the activities being carried out so that it can affect the responsibilities of the assignment.*
- 2) *ISU is said to act objectively when it is independent and unbiased and avoids the possibility of a conflict of interest.*
- a) *ISU must have an objective mental attitude, be independent and avoid possible conflicts of interest in carrying out supervisory duties.*
 - b) *ISU must be sure that they can make professional decisions freely, their work results are reliable, trustworthy, and free from outside influence so that they can produce objective reports and can be used by all related parties.*

- 3) SPI harus menjaga integritas melalui:
- a) SPI dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - b) SPI harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - c) SPI tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- d. Uraian tugas satuan kerja audit internal
Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- 1) Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan.
 - 2) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya GCG, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
- 3) *ISU must be maintain integrity through:*
- a) *ISU is prohibited from receiving compensation in any form from employees, clients, or company partners so that it can affect their professional judgment.*
 - b) *ISU must show an honest and serious mental attitude in carrying out its duties and fulfilling its responsibilities.*
 - c) *Isu may not knowingly engage in actions or activities that may damage the image.*
- d. *Job description of the internal audit work unit*
In carrying out its duties, SPI has duties and responsibilities to:
- 1) *Assist the Board of Directors in fulfilling their responsibilities in managing the company, by way of auditing compliance, operations, and performance of all activities of the company's work units in an integrated manner on compliance, completeness, and use of accounting, financial and other controls as well as providing suggestions for improvement towards on achieving the goals and objectives that have been set in each work unit and the company.*
 - 2) *Assist the Board of Directors in efforts to improve the realization of GCG, encourage the effectiveness of the company's internal control system, improve risk management and company performance, and apply business ethics;*

- 3) Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
 - 4) Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
 - 5) Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
 - 6) Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
 - 7) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
 - 8) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
 - 9) Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
 - 10) Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA).
- 3) *Helping the Board of Directors to pay attention to changes in the industrial environment, business risks that may arise, opportunities for efforts to increase efficiency and effectiveness, and other matters that affect the company's performance;*
 - 4) *Encouraging work units within the Company in increasing the effectiveness of the internal control system and achieving work unit performance targets to achieve the Company's vision, mission, goals, and objectives;*
 - 5) *Provide an assessment of the adequacy and effectiveness of the company's internal control system and risk management of the company's activities;*
 - 6) *Report on important matters relating to weaknesses and opportunities for improvement in the process of controlling the company's financial and operational activities;*
 - 7) *Identify the activities to be audited, evaluate and assess the level of risk of these activities about the audit plan;*
 - 8) *Provide regular reports on the results of the semester, annual and follow-up audits (special audits) as well as the adequacy of audit resources;*
 - 9) *Provide recommendations for improvements to the company's business processes and internal controls;*
 - 10) *Monitor the implementation and accuracy of the follow-up implementation of the Audit Report (AR).*

- e. Jumlah pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal/SPI

Jumlah pegawai yang berada di bawah Unit Kerja SPI PT Jamkrida Jabar (Perseroda) saat ini berjumlah 1 (satu) orang terdiri dari Kepala SPI.

- f. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama. Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.

- e. *Number of employees in the Internal Audit Work Unit/ISU*

The number of employees under the SPI Work Unit of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) currently amounts to 1 (one) person consisting of the Head of SPI.

- g. *Report on the results of the implementation of internal audit tasks*

The report on the results of the implementation of the internal audit is submitted directly by the internal audit to the Main Director.

The report contains recommendations and corrective actions, as well as responses from related sectors.

3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal

3. *The function of the external auditor*

The effectiveness of the implementation of the external auditor's duties and the compliance of the Guarantee Agency with the provisions, including among others regarding the provision of all accounting records and supporting data needed for the external auditor, so as to enable the external auditor to give his opinion regarding the fairness, compliance, and conformity of the Guarantee Institution's financial statements with the applicable auditing standards .

At the time of the inspection by the External Auditor, good communication and cooperation between the External Auditor and Management had been carried out intensively.

The Board of Directors supports findings related to accounting policies, interpretations of applicable accounting standards, developments in OJK regulations, and others.

The Board of Directors also actively monitors the follow-up of the External Auditor's audit findings so that it is hoped

tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
KAP yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada AP telah memenuhi aspek-aspek:
 - 1) Kapasitas KAP yang ditunjuk;
 - 2) Legalitas perjanjian kerja;
 - 3) Ruang lingkup audit;
 - 4) Standar profesional akuntan publik; dan
 - 5) Komunikasi antara OJK dengan KAP yang ditunjuk.
- e. AP yang ditunjuk telah:
 - 1) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
 - 2) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

that similar findings will not be repeated in the future.

Implementation of the External Audit Function has been going well, which can be seen from the following:

- a. *The company always appoints a Public Accountant (PA) and a Public Accounting Firm (PAF) that are registered with OJK.*
- b. *Appointment of the same PA and PAF by the Company for no more than 5 (five) consecutive financial years.
The PAF that has audited the Company's financial statements for the last 5 (five) years, can be seen in the table below.*
- c. *The appointment of PA and PAF has obtained approval and recommendation from the Board of Commissioners.*
- d. *Assignment of inspection to PA has fulfilled the following aspects:*
 - 1) *Capacity of appointed PAF;*
 - 2) *Legality of work agreements;*
 - 3) *The scope of the audit;*
 - 4) *Professional standards of public accountants; and*
 - 5) *Communication between OJK and the appointed PAF.*
- e. *The appointed PA has:*
 - 1) *Deliver audit results and management letters to the Company promptly.*
 - 2) *Able to work independently, and meet the professional standards of public accountants and work agreements as well as the established audit scope.*

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 2024

AP dan KAP yang melakukan audit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) selama 5 (lima) tahun terakhir:

PA and PAF who have audited the financial statements of PT Jamkrida Jabar (Perseroda) for the last 5 (five) years:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik dan Nomor Registrasi OJK Name of Public Accountant and OJK Registration Number	Biaya Auditor Eksternal External Auditor Fee (Rp)
2024	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	177.000.000,00
2023	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00
2022	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00
2021	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL SYSTEM, AND INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Direksi bertanggung jawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi
Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi
Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi.
4. Struktur organisasi sistem informasi
Organisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Staf SMI sebagai penanggung jawab pengembangan operasional teknologi informasi..
 - b. Staf SMI sebagai penanggung jawab infrastruktur teknologi informasi..

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners
 - a. The Board of Directors is responsible for implementing risk management strategies and policies, internal control systems, and information technology governance and provides reports to the Board of Commissioners.
 - b. The Board of Commissioners oversees the overall level of effectiveness and implementation of policies.
2. Adequacy of policies, procedures, and use of information technology
Risk management policies, procedures, and the use of information technology require the company to comply with the rules and regulations that have been set.
3. Adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling the risks of using information technology
This policy establishes risk management principles and processes which are carried out in stages: risk identification, risk assessment, risk management, and monitoring and evaluation.
4. Information system organizational structure
PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Information Management System Management Organization consists of:
 - a. IT staff as the person in charge of information technology operational development.
 - b. IT staff as the person in charge of information technology infrastructure.

- | | |
|--|---|
| <p>5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi
Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman <i>Disaster Recovery Plan</i> Perseroan.</p> | <p>5. <i>Internal control system for the use of information technology</i>
<i>The internal control system for the use of information technology refers to the SOP for Management Information Systems and the Company's Disaster Recovery Plan Guidelines.</i></p> |
| <p>6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara reguler dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.</p> | <p>6. <i>Comprehensive internal control system</i>
<i>Compliance with risk policies and guidelines is regularly monitored by the work unit concerned.</i></p> |

PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KARYAWAN

IMPLEMENTATION OF REMUNERATION POLICY AND OTHER FACILITIES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF SHARIA SUPERVISORY, AND EMPLOYEES

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

1. Disclosure of remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory (BSS).

a. Remunerasi dalam bentuk non natura.

a. Remuneration in non-natura forms.

Pada tahun 2024 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti (khusus Direksi), tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

In 2024 the Company provides non-natura remuneration to the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, namely in the form of basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances (especially for Directors), holiday allowances, incentives, and bonus originating from the Company's net profit.

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non tunai.

b. Other facilities in natura forms/non-cash.

Pada tahun 2024 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu tunjangan transportasi dan asuransi kesehatan.

In 2024 the Company provides natura remuneration to the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, namely transportation allowances and health insurance.

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

2. Disclosure of remuneration packages or policies within 1 (one) year

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

a. Packages or remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS determined by the GMS.

Pada tahun 2024, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

In 2024, the GMS determines the remuneration policy in 1 (one) year for the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, including basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances, holiday allowances, incentives, and

bonus originating from the Company's net profit.

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

- b. Remuneration and other facilities for all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS include at least the number of members of the Board of Directors, the number of members of the Board of Commissioners, the number of members of the BSS and the total number of remuneration policies and other facilities.*

2 Orang Direksi, 2 Orang Dewan Komisaris, dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah.

2 Directors, 2 Commissioners, and 2 Board of Sharia Supervisory.

Jumlah yang diterima dalam satu tahun <i>Amount received in one year</i>		Remunerasi *) <i>Remuneration *)</i>	Fasilitas lain dalam bentuk natura**) <i>Other facilities in kind natura form**)</i>
Direksi <i>Board of Directors</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) <i>Nominal (Millions of IDR)</i>	3.707,4	433,04
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Jumlah Dewan Komisaris <i>Number of Board Commissioners</i>	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) <i>Nominal (Millions of IDR)</i>	1.391,6	211,5
Dewan Pengawas Syariah <i>Board of Sharia Supervisory</i>	Jumlah DPS <i>Number of BSS</i>	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) <i>Nominal (Millions of IDR)</i>	572,3	25,7

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

***) Transportasi dan asuransi kesehatan.

Information:

*) Including salary and other fixed income, including benefits, share-based compensation, bonus, and other forms of non-natura remuneration

***) Transportation and health insurance.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

- c. The number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS who receive remuneration packages in 1 (one) year are grouped according to income level as follows:*

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai <i>Total Remuneration per Person in 1 (one) year in cash</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>	Jumlah DPS <i>Number of BSS</i>
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) <i>Above IDR 2,000,000,000.00 (two billion IDR)</i>	1	0	0
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) <i>Above IDR 1,000,000,000.00 (one billion IDR) up to IDR 2,000,000,000.00 (two billion IDR)</i>	1	1	0

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai <i>Total Remuneration per Person in 1 (one) year in cash</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>	Jumlah DPS <i>Number of BSS</i>
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) <i>Above IDR 500,000,000.00 (five hundred million IDR) up to IDR 1,000,000,000.00 (one billion IDR)</i>	0	0	0
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah <i>IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and below</i>	0	1	2

Jumlah yang tercantum diambil dari total Pendapatan (THP) Bruto per Tahun Buku 2024
The amount listed is taken from the total Gross Take Home Pay per Fiscal Year 2024

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

3. *The ratio of the highest and lowest salaries*

The salary that is compared in the salary ratio is the imbalance received by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees in the last month of the reporting year.

The ratio of salary and lowest, in the following comparison scale:

- the ratio of the highest and lowest employee salaries;*
- the ratio of the salaries of the highest and lowest members of the Board of Directors;*
- the ratio of the salaries of the highest and lowest members of the Board of Commissioners; and*

- d. *the highest salary ratio for members of the Board of Directors and employees.*

Rasio gaji <i>Salary ratio</i>
a) 5,29 : 1
b) 1 : 1
c) 1,11 : 1
d) 2,76 : 1

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui *website* www.jamkrida-jabar.co.id dan media cetak.
3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada *website*.

RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN

1. Rencana strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a. Memperkuat portofolio produk penjaminan eksisting dan baru.
 - b. Memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar melalui investasi sebagai resiprokal.
 - c. Meningkatkan efektivitas dan standardisasi proses kerja serta efisiensi proses internal dalam layanan klaim.
 - d. Meningkatkan tingkat imbal hasil investasi melalui optimalisasi portofolio investasi.
 - e. Meningkatkan subrogasi sebagai salah satu upaya *recovery* klaim.
 - f. Mengembangkan pasar secara nasional.
 - g. Menurunkan nilai piutang re/kogaransi.
 - h. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM.
 - i. Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan *risk management* yang *prudent*.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

The Company has prepared and presented reports by the provisions regarding the transparency of the Company's financial and non-financial conditions with the following details:

1. *The Company has submitted Annual Financial Reports promptly to the Financial Services Authority and other interested parties.*
2. *The Company's Annual Financial Report is published through the website www.jamkrida-jabar.co.id and print media.*
3. *Information regarding guarantee service products issued by the company is available on the website.*

CORPORATE STRATEGIC PLAN

1. *Short-term strategic plan for 1 (one) year.*
 - a. *Strengthening the existing and new guarantee product portfolio.*
 - b. *Strengthen and develop partnership networks for market penetration & expansion through reciprocal investment.*
 - c. *Increase the effectiveness and standardization of work processes as well as the efficiency of internal processes in claims services.*
 - d. *Increasing the level of investment returns through optimizing the investment portfolio.*
 - e. *Increasing subrogation as a claim recovery effort.*
 - f. *Developing the market nationally.*
 - g. *Reduce the value of re/co-guarantee receivables.*
 - h. *Increasing HR competency and productivity.*
 - i. *Increasing the culture of risk awareness and implementing prudent risk management.*
 - j. *Increase revenue, market share and profitability by prioritizing prudent underwriting.*

- j. Meningkatkan pendapatan, *market share*, dan *profitability* dengan mengedepankan *underwriting* yang *prudent*.
 - k. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi secara berkelanjutan.
 - l. Meningkatkan kualitas *cost control* khususnya pada biaya-biaya operasional.
2. Rencana strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
- a. Memperluas jaringan pemasaran melalui penambahan kantor pemasaran/unit pelayanan di beberapa kabupaten/kota.
 - b. Mengintegrasikan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi secara terpadu.
3. Rencana strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
- a. Memperluas layanan dan jangkauan pemasaran pada perbankan BUKU 3 dan 4.
 - b. Memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran melalui pembukaan kantor perwakilan.
 - c. Melakukan *Spin Off* Unit Usaha Syariah dengan syarat bahwa kontribusi kinerja Penjaminan syariah mencapai minimal 30% dari total portofolio penjaminan.
4. Rencana Kerja & Anggaran Tahunan
- a. Proyeksi Volume Penjaminan tahun 2025 adalah senilai Rp16,31 triliun atau naik sebesar 57,16% jika dibandingkan dengan Prognosa 2024 senilai Rp10,38 triliun, dimana untuk penjaminan sektor produktif tumbuh sebesar 110,65% dan sektor non produktif tumbuh sebesar 10,99%.
 - b. Proyeksi Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Accrual Basis tahun 2025 adalah senilai Rp261,54 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 1,53% jika dibandingkan dengan Prognosa 2024 senilai Rp257,60 miliar, Perseroan optimis IJP Accrual
- k. *Developing information technology applications sustainably.*
 - l. *Improving the quality of cost control, especially operational costs.*
2. *Medium-term strategic plan for 3 (three) years.*
- a. *Expanding the marketing network by adding marketing offices/service units in several districts/cities.*
 - b. *Integrated information technology infrastructure and applications in an integrated manner.*
3. *Long-term strategic plan for 5 (five) years.*
- a. *Expanding services and marketing outreach to BUKU 3 and 4 banking.*
 - b. *Strengthening and expanding the marketing network through opening representative offices.*
 - c. *Perform Sharia Business Unit Spin-Off with the condition that the performance contribution of Sharia Guarantee reaches a minimum of 30% of the total guarantee portfolio.*
4. *Annual Work Plan & Budget*
- a. *The 2025 Guarantee Volume Projection is worth IDR16.31 trillion or an increase of 57.16% compared to the 2024 Prognosis of IDR10.38 trillion, where the guarantee for the productive sector grew by 110.65% and the non-productive sector grew by 10.99%.*
 - b. *The projection of Guarantee Service Fee (IJP) Accrual Basis in 2025 is worth IDR261.54 billion or an increase of 1.53% compared to the 2024 Prognosis of IDR257.60 billion, the Company is optimistic that the IJP*

- Basis sektor produktif tumbuh sebesar 112,75%.
- c. Proyeksi Total Aset tahun 2025 adalah senilai Rp698,48 miliar atau lebih tinggi sebesar 13,75% jika dibandingkan dengan Prognosa 2024 senilai Rp614,06 miliar.
- d. Proyeksi Total Ekuitas tahun 2025 adalah senilai Rp32,63 miliar atau naik sebesar 10,15%, terutama bersumber dari Penyertaan Modal Daerah senilai Rp 27,09 Miliar pada bulan Desember 2025 dan laba Tahun 2025 yang diproyeksikan senilai Rp 9,92 miliar.
- e. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2025 adalah senilai Rp130,81 miliar atau naik sebesar 21,61% jika dibandingkan dengan Prognosa 2024 senilai Rp107,56 miliar.
- f. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Panjang tahun 2025 adalah senilai Rp213,66 miliar atau naik sebesar 15,41% jika dibandingkan dengan Prognosa 2024 senilai Rp185,12 miliar.
- g. Proyeksi Laba Tahun Berjalan tahun 2025 adalah senilai Rp 9,93 miliar atau naik sebesar 40,57% jika dibandingkan dengan Prognosa 2024 senilai Rp7,06 miliar.
- h. Proyeksi Management Fee tahun 2025 adalah senilai Rp18,24 miliar atau turun sebesar 36,57% dibandingkan Prognosa 2024 senilai Rp28,75 miliar.
- i. Proyeksi Biaya Akuisisi tahun 2025 adalah senilai Rp27,64 miliar atau naik sebesar 27,96% dibandingkan Prognosa 2024 senilai Rp38,37 miliar.
- j. Proyeksi Pendapatan Investasi tahun 2025 adalah senilai Rp13,46 miliar atau turun sebesar 9,33% dibandingkan Prognosa 2024 senilai Rp14,84 miliar, hal ini disebabkan secara rata-rata Dana kelolaan Investasi pada Rencana Bisnis 2025 lebih rendah dibandingkan Prognosa
- Accrual Basis in the productive sector will grow by 112.75%.*
- c. Total Asset Projection in 2025 is worth IDR698.48 billion or 13.75% higher compared to the 2024 Prognosis of IDR614.06 billion.*
- d. Total Equity Projection in 2025 is worth IDR32.63 billion or an increase of 10.15%, mainly sourced from Regional Capital Participation worth IDR27.09 billion in December 2025 and 2025 profit projected to be worth IDR9.92 billion.*
- e. The Total Short-Term Liabilities Projection for 2025 is worth IDR130.81 billion or an increase of 21.61% compared to the 2024 Prognosis of IDR107.56 billion.*
- f. The projected Total Long Term Liabilities in 2025 is IDR213.66 billion or an increase of 15,41% compared to the 2024 Prognosis of IDR185.12 billion.*
- g. The 2025 Current Year Profit Projection is worth IDR9.93 billion or an increase of 40.57% compared to the 2024 Prognosis of IDR 7.06 billion.*
- h. The 2025 Management Fee projection is worth IDR18.24 billion or down 36.57% compared to the 2024 Prognosis of IDR28.75 billion.*
- i. The 2025 Acquisition Cost Projection is worth IDR27.64 billion or an increase of 27.96% compared to the 2024 Prognosis of IDR38.37 billion.*
- j. The 2025 Investment Income Projection is worth IDR13.46 billion or down by 9.33% compared to the 2024 Prognosis of IDR14.84 billion, this is because the average Investment Managed Funds in the 2025 Business Plan are lower than the 2024 Prognosis, namely in the 2025 Business Plan worth IDR260.83 billion and the 2024 Prognosis worth IDR283.28 billion, or there is a difference of IDR22.45 billion. Capital Participation from the West Java Provincial Government worth*

2024, yaitu pada Rencana Bisnis 2025 senilai Rp260,83 miliar dan Prognosa 2024 senilai Rp283,28 miliar, atau terdapat selisih senilai Rp22,45 miliar. Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp27,09 miliar diasumsikan diterima pada bulan Desember 2025, sehingga tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Investasi.

- k. Proyeksi Pendapatan Subrogasi tahun 2025 adalah senilai Rp6,70 miliar atau naik sebesar 34,00% dibandingkan Prognosa 2024 senilai Rp5,00 miliar.
- l. Proyeksi Beban Klaim tahun 2025 adalah senilai Rp110,02 miliar mengalami kenaikan sebesar 20,22 miliar atau 22,51% dibandingkan Prognosa 2024 senilai Rp89,81 miliar, Proyeksi beban klaim dihitung berdasarkan *forecast linear* dari pembayaran klaim selama 3 tahun terakhir dan rata-rata persentase keterjadian klaim. Proyeksi senilai Rp110,02 miliar berasal dari Penjaminan periode sebelumnya senilai Rp88,41 miliar dan dari penjaminan tahun 2025 sebesar Rp21,61 miliar (khususnya bersumber dari skim kredit mikro).
- m. Proyeksi Beban Operasional tahun 2025 adalah senilai Rp8,59 miliar atau naik sebesar 24,87% dibandingkan Prognosa 2024 senilai Rp6,88 miliar. Beban Operasional diproyeksikan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan frekuensi perjalanan dinas dan beban penagihan subrogasi dalam rangka mencapai target pendapatan penjaminan dan pendapatan subrogasi.
- n. Proyeksi Beban Regaransi/Asuransi Jiwa tahun 2025 adalah senilai Rp87,55 miliar atau lebih rendah sebesar 31,67% dibandingkan Prognosa 2024 senilai Rp128,12 miliar. Hal ini terutama disebabkan pada Rencana Bisnis 2025 Perseroan

IDR27.09 billion is assumed to be received in December 2025, so it does not affect Investment Income.

- k. The 2025 Subrogation Income Projection is worth IDR6.70 billion or an increase of 34.00% compared to the 2024 Prognosis of IDR5.00 billion.*
- l. Claim Expense Projection in 2025 is worth IDR110.02 billion, an increase of 20.22 billion or 22.51% compared to the 2024 Prognosis of IDR89.81 billion. The claim expense projection is calculated based on the linear forecast of claim payments over the past 3 years and the average percentage of claim occurrence. The projection of IDR110.02 billion comes from the Guarantee of previous period worth IDR88.41 billion and from the guarantee in 2025 of IDR21.61 billion (especially from the micro credit scheme).*
- m. Projected Operational Expenses in 2025 are worth IDR8.59 billion or an increase of 24.87% compared to the 2024 Prognosis of IDR6.88 billion. Operational Expenses are projected to increase in line with the increase in the frequency of official travel and subrogation collection expenses in order to achieve the target of guarantee income and subrogation income.*
- n. Projection of Life Insurance/Guarantee Expense in 2025 is IDR87.55 billion or 31.67% lower than the 2024 Prognosis of IDR128.12 billion. This is mainly because in the 2025 Business Plan the Company does not cover life risks, so for the Guarantee only carries out risk sharing of default risk of 20% for multipurpose credit schemes and cooperative credit schemes, from risk sharing of life and default risks of 68% in the 2024 prognosis.*

- tidak meng-cover risiko jiwa, sehingga untuk Regaransi hanya melakukan *risk sharing* risiko macet sebesar 20% untuk skim kredit multiguna dan skim kredit koperasi, dari *risk sharing* risiko jiwa dan macet sebesar 68% pada prognosa 2024.
- o. Proyeksi Beban SDM tahun 2025 adalah senilai Rp30,66 miliar atau naik sebesar 59,46% dibandingkan Prognosa 2024 senilai Rp19,22 miliar. Pertumbuhan ini sejalan dengan adanya proyeksi penyesuaian SDM, rencana pembukaan kantor pemasaran/perwakilan di Yogyakarta. Selain itu, pertumbuhan ini disebabkan adanya anggaran pada Prognosa 2024 tidak direalisasikan pada Prognosa 2024, antara lain : Insentif senilai Rp2,6 miliar dan Cadangan Tantiem & Bonus senilai Rp3,96 miliar.
- p. Proyeksi Beban Administrasi dan Umum tahun 2025 adalah senilai Rp11,50 miliar atau naik sebesar 28,63% dibandingkan Prognosa 2024 senilai Rp8,94 miliar. Hal ini dipengaruhi beban terkait upaya Perseroan dalam meningkatkan kinerja, diantaranya:
- Sewa 4 unit Kendaraan Roda Empat (mobil) senilai Rp852 juta,
 - Sewa Layanan data dan internet senilai Rp588 juta,
 - Penyusutan dan amortisasi senilai Rp1,68 miliar,
 - CSR senilai Rp750 juta,
 - Dan Beban Lainnya.
- o. *Projected HR Expenses in 2025 are worth IDR30.66 billion or an increase of 59.46% compared to the 2024 Prognosis of IDR19.22 billion. This growth is in line with the projection of HR adjustments, the plan to open a marketing/representative office in Yogyakarta. In addition, this growth is due to the budget in the 2024 Prognosis not being realized in the 2024 Prognosis, including: Incentives worth IDR2.6 billion and Tantiem & Bonus Reserves worth IDR3.96 billion.*
- p. *Projected General and Administrative Expenses in 2025 are worth IDR11.50 billion or an increase of 28.63% compared to the 2024 Prognosis of IDR8.94 billion. This is influenced by expenses related to the Company's efforts to improve performance, including:*
- *Rental of 4 units of Four-Wheeled Vehicles (cars) worth IDR852 million,*
 - *Rental of data and internet services worth IDR588 million,*
 - *Depreciation and amortization worth IDR1.68 billion,*
 - *CSR worth IDR750 million,*
 - *And Other Expenses.*

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS WHICH ACHIEVE 5% (FIVE PER HUNDRED) OR MORE, WHICH COVERS TYPE AND NUMBER OF SHARE

No. No.	Nama Name	Kategori Kepemilikan Saham *) Category Ownership Share *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham Nominal Amount of Share Ownership	Persentase Kepemilikan Saham Percentage of Share Ownership
1	Tidak Ada None	A	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		B	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		C	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		D	Nihil Nothing	Nihil Nothing

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
The guarantor institution concerned;
- B. Lembaga Penjamin lain;
Other Guarantee Institutions;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin; dan
Financial services companies other than Guarantee Institutions; and
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
Other companies domiciled inside or outside the country, including shares acquired through the stock exchange.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

DISCLOSURE OF FINANCIAL RELATIONSHIPS AND FAMILY RELATIONSHIPS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MEMBERS OF THE BSS WITH OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, OTHER BSS MEMBERS, AND/OR SHAREHOLDERS OF PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

1. *Financial relationships and family relationships of members of the Board of Directors with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the BSS, and/or PT Jamkrida Jabar (Perseroda) shareholders*

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Agus Subrata	Direksi Lainnya <i>Other Directors</i>		√		√	
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah <i>Board of Sharia Supervisory</i>		√		√	
		Pemegang saham <i>Shareholders</i>		√		√	
2	Taufiek Dharviandi	Direksi Lainnya <i>Other Directors</i>		√		√	
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah <i>Board of Sharia Supervisory</i>		√		√	
		Pemegang saham <i>Shareholders</i>		√		√	

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 2024

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

2. *Financial relationships and family relationships between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, members of the BSS, and/or PT Jamkrida Jabar (Perseroda) shareholders*

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Direksi <i>Board of Directors</i>		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya <i>Other Commissioners</i>		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah <i>Board of Sharia Supervisory</i>		√		√	
		Pemegang saham <i>Shareholders</i>		√		√	
2	Muhammad Iskandar	Direksi <i>Board of Directors</i>		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya <i>Other Commissioners</i>		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah <i>Board of Sharia Supervisory</i>		√		√	
		Pemegang saham <i>Shareholders</i>		√		√	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

3. *Financial relationships and family relationships of BSS members with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, other BSS members, and/or PT Jamkrida Jabar (Perseroda) shareholders*

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan <i>Relationship with</i>	Bentuk Hubungan <i>Relationship Form</i>				Keterangan <i>Information</i>
			Keuangan <i>Family</i>		Keluarga <i>Finance</i>		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Zaini Abdul Malik	Direksi <i>Board of Directors</i>		√		√	
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		√		√	
		DPS Lainnya <i>Other BSS</i>		√		√	
		Pemegang saham <i>Shareholders</i>		√		√	
2	Khozin Abu Faqih	Direksi <i>Board of Directors</i>		√		√	
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		√		√	
		DPS Lainnya <i>Other BSS</i>		√		√	
		Pemegang saham <i>Shareholders</i>		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Information:

The financial relationship is when a person receives income, financial assistance, or loans from members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Guarantee Institution, Guarantee Institution whose controlling shareholders are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Guarantee Institution, and/or the controlling shareholder of the Institution Guarantor.

Family relationship is having a family relationship up to the second degree, both vertical and horizontal, including in-laws, son-in-law, and in-laws, so what is meant by family includes biological/step/adopted parents, siblings/step/adopted siblings and their husbands or wives, biological children /step/adoptive, biological/step/adopted grandparents, biological/step/adopted grandchildren, siblings/step/adopted parents and their husbands or wives, in-laws, in-laws, in-laws, husbands/wives of biological/step/adopted children, husband or wife's grandfather or grandmother, husband/wife of biological/step/adopted grandchildren, and biological/step/adopted siblings of husband or wife and their husband or wife

PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA
OTHER IMPORTANT DISCLOSURES

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
Resignation or dismissal of the external auditor

Tidak Ada
None

2. Transaksi material dengan pihak terkait
Material transactions with related parties

Tidak Ada
None

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi
Ongoing and/or potential conflicts of interest

No. No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position of Parties Having Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Position of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) <i>Transaction Value (Millions of Rupiah)</i>	Keterangan*) <i>Information*)</i>
1	-	-	-	-	-

Keterangan:
Information:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku
Not by applicable systems and procedures

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan
During 2024, there were no transactions containing conflicts of interest in the Company

4. Informasi material lain mengenai PT Jamkrida Jabar (Perseroda)
Other material information regarding PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

Tidak ada
None

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen
Resignation or dismissal of the Independent Commissioner

Pengunduran diri Komisaris Utama
Resignation of the President Commissioner

6. Sertifikasi
Certification

No. No.	Materi Sertifikasi <i>Certification Material</i>	Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Peserta <i>Participant</i>
1 2	QRGP Sertifikasi CRMP	13 & 19 Februari 2024 13 Agustus 2024	LPMA STMA Trisakti & LSPMR PT RAP	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Anggota Komite <i>Pemantau Risiko</i>
3	Sertifikasi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis	12 Desember 2024	PT BCG & LSP Penjaminan	Direktur <i>Operasional Operations Director</i>
4 5	Sertifikasi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris QRGP	16 Desember 2024 13 & 19 Februari 2024	PT BCG & LSP Penjaminan LPMA STMA Trisakti & LSPMR	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>

7. Tenaga kerja asing
Foreign workers

Selama tahun 2024, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing.
During 2024, the Company does not employ foreign workers.

No. No.	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nomor Uji Kepatutan & Kelayakan <i>Number of Fit and Proper Test</i>	KITAS <i>Limited Stay Permit Card</i>		IMTA <i>Permit to Use Foreign Workers</i>	
				Izin Kerja Work Permit	Masa Berlaku Validity Period	No. Izin No. Permit	Masa Berlaku Validity Period
1	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal
Total internal fraud

Selama tahun 2024, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Perseroan.
During 2024, there were no internal fraud committed by the management, permanent employees or non-permanent employees of the Company.

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun <i>Internal fraud within 1 (one) year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh <i>Number of cases committed by</i>		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS <i>Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Sharia Supervisory</i>	Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i>	Pegawai Tidak Tetap <i>Temporary Employees</i>
Total penyimpangan <i>Total fraud</i>	-	-	-
Telah diselesaikan <i>Resolved</i>	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal <i>In the process of internal completion</i>	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian <i>No solution yet</i>	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Followed up through the legal process</i>	-	-	-

9. Permasalahan hukum
Legal problems

Selama tahun 2024, Perseroan tidak memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.
During 2024, the Company will not have legal problems, both civil and criminal.

Permasalahan Hukum <i>Legal Problems</i>	Jumlah Kasus <i>Number of Cases</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap <i>Has obtained a decision that has permanent legal force</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata <i>In the process of settlement in court and in alternative dispute resolution institutions for civil cases</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>
Total <i>Total</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>


10. Etika bisnis Perusahaan
Company business ethics

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

The business ethics that are used as a reference for the Company and all employees are contained in the PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Code of Conduct.

Menyetujui,
Approve,

Direksi
Director



Agus Subrata
Direktur Keuangan
Finance Director



Taufiek Dharviandi
Direktur Operasional
Operations Director

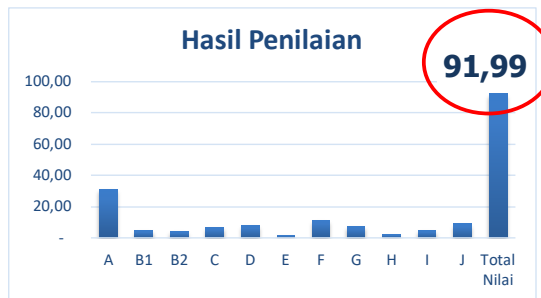
PENILAIAN SECARA MANDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK *SELF ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Untuk periode Tahun 2024 PT Jamkrida Jabar (Perseroda) telah melakukan penilaian secara mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

For the 2024 period PT Jamkrida Jabar (Perseroda) has conducted a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance, with the following assessment results:

Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian			Hasil Penilaian		
Nilai	Rangking	Predikat	Faktor	Format	Nilai
84-100	1	Sangat Baik	1	A	31,11
68-83	2	Baik	2	B1	4,71
52-67	3	Cukup Baik		B2	4,30
36-51	4	Kurang Baik	3	C	6,50
20-35	5	Tidak Baik	4	D	7,93
			5	E	2,14
			6	F	11,50
			7	G	7,50
			8	H	2,50
			9	I	5,00
			10	J	8,80
Total Nilai					91,99
Predikat					Sangat Baik



Berdasarkan tabel Hasil Penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dengan raihan nilai 91,99 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan), telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan predikat "Sangat Baik".

Based on the Assessment Results table above, it can be concluded that PT Jamkrida Jabar (Perseroda) with a score of 91.99 (ninety one point ninety nine), has implemented Good Corporate Governance with the title "Very Good".

RENCANA TINDAK ACTION PLAN


Rencana tindak Perseroan di tahun 2024 akan melakukan beberapa tindakan korektif, yaitu:

- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian strategis, keuangan, dan operasional perusahaan.
- Melengkapi Pedoman Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Sertifikasi ISO 9001:2015.
- Memperbarui rencana bisnis jangka menengah/panjang perusahaan.
- Melakukan pengisian posisi Direktur Utama dan Komisaris Independen yang kosong.
- Melakukan rekrutmen SDM pada beberapa unit kerja.

The Company's action plan in 2024 will take several corrective actions, namely:

- Develop Key Performance Indicators (KPIs) to measure the company's strategic, financial, and operational achievements.*
- Complete the Risk Management Guidelines to support the implementation of risk measurement, monitoring, and control processes.*
- Implementation of the Quality Management System and ISO 9001:2015 Certification.*
- Update the company's medium/long-term business plan.*
- Filling the vacant positions of President Director and Independent Commissioner.*
- Recruiting human resources in several work units.*

Menyetujui,
Approve,

Direksi <i>Board of Directors</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Dewan Pengawas Syariah <i>Board of Sharia Supervisory</i>
			
Agus Subrata Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Taufiek Dharviandi Direktur Operasional <i>Operations Director</i>	Muhammad Iskandar Komisaris Utama Independen <i>Independent President Commissioner</i>	Zaini Abdul Malik Ketua Dewan Pengawas Syariah <i>Chairman of the Board of Sharia Supervisory</i>

GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT

PT JAMKRIDA JABAR
(PERSERODA)

2024



PT JAMKRIDA J
SOLUSI KUMKM MASYARAKAT